



# RENCANA STRATEGIS

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN  
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024 - 2026

# DAFTAR ISI

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| KATA PENGANTAR                                                         | i             |
| DAFTAR ISI                                                             | ii            |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                              | <b>I.1</b>    |
| 1.1. LATAR BELAKANG                                                    | I.1           |
| 1.2. DASAR HUKUM                                                       | I.2           |
| 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN                                                 | I.5           |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN                                             | I.6           |
| <b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>                     | <b>II.1</b>   |
| 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD                        | II.1          |
| 2.2. SUMBER DAYA SKPD                                                  | II.3          |
| 2.3. KINERJA PELAYANAN                                                 | II.7          |
| 2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN                                          | II.17         |
| <b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>        | <b>III.1</b>  |
| 3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN                                            | III.1         |
| 3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS                                       | III.4         |
| <b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>                                      | <b>IV.1</b>   |
| 4.1. TUJUAN DAN SASARAN                                                | IV.1          |
| 4.2. CASCADING KINERJA                                                 | IV.4          |
| <b>BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>                                   | <b>V.1</b>    |
| 5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN                                            | V.1           |
| 5.2. OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH                   | V.6           |
| <b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b> | <b>VI.1</b>   |
| <b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                  | <b>VII.1</b>  |
| <b>BAB VIII. PENUTUP</b>                                               | <b>VIII.1</b> |

# KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk memajukan perekonomian di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian dan Usaha Mikro di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan Perdagangan, Perindustrian, Perkoperasian dan Usaha Mikro di Kota Pontianak.

Pontianak, Maret 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024-2026.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024.
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 121).
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

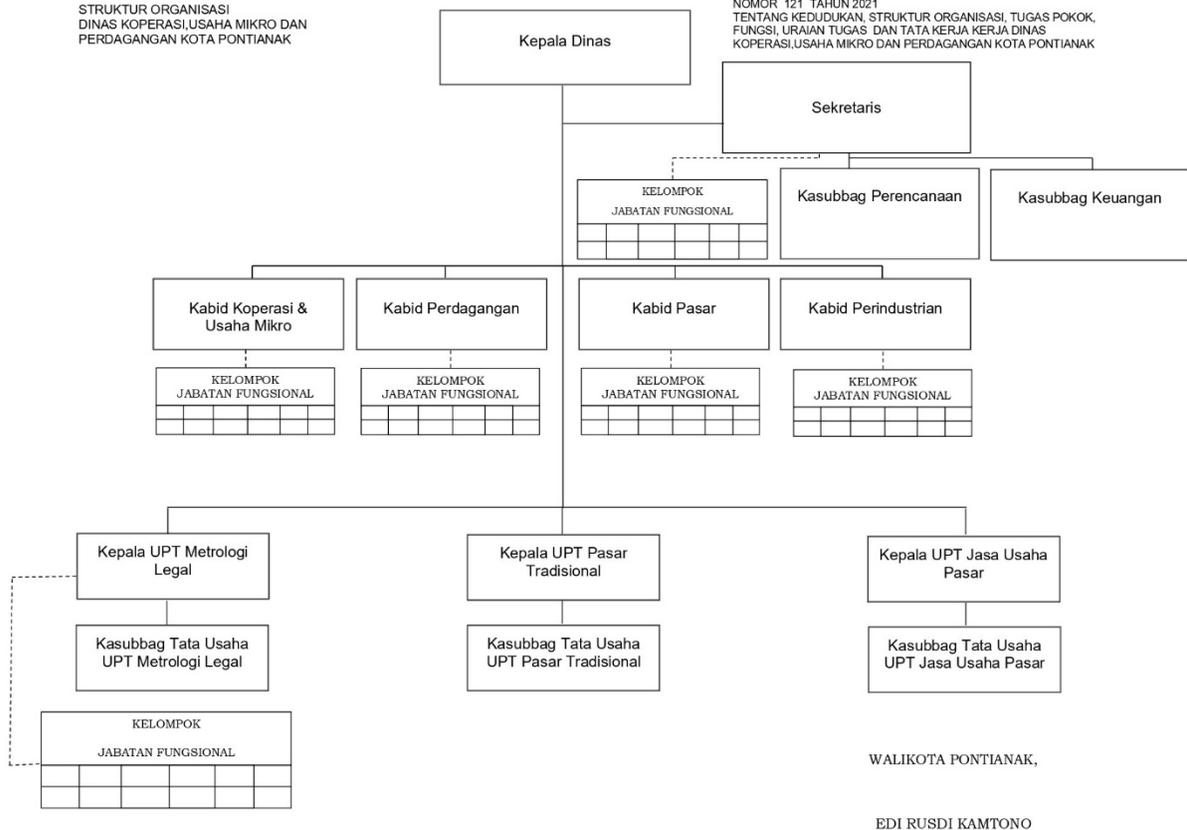
Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota memimpin dan mengoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
  1. Subbagian Perencanaan; dan
  2. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Bidang Perdagangan
- e. Bidang Pasar;
- f. Bidang Perindustrian;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



### 2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

### 2.1.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

#### 2.1.2.1 Sub bag perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan. Sedangkan ruang lingkup sub bagian perencanaan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja.

#### 2.1.2.2 Sub bag keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang keuangan. Sedangkan ruang lingkup sub bagian Keuangan meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran, dan pembinaan teknis terhadap fungsional keuangan.

### *2.1.3 Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro*

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Sedangkan ruang lingkup bidang koperasi dan usaha mikro meliputi pembinaan dan pengawasan koperasi dan lembaga keuangan serta bina usaha mikro kecil.

### *2.1.4 Kepala Bidang Perdagangan;*

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang perdagangan. Ruang lingkup bidang perdagangan meliputi logistik dan sarana perdagangan serta pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan.

### *2.1.5 Kepala Bidang Pasar*

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas pokok adalah merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pasar. Ruang lingkup bidang pasar meliputi registrasi dan retribusi pedagang pasar tradisional dan informal serta pembinaan dan penataan sarana prasarana pasar tradisional.

### *2.1.6 Kepala Bidang Perindustrian*

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Industri.

Sedangkan ruang lingkup bidang industri meliputi sarana dan bimbingan produksi industri, serta pengembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industri.

### *2.1.7 UPT*

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

## 2.2. Sumber Daya

2.3.1. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Untuk susunan Pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 Jumlah Pegawai dari segi kepangkatan/golongan ruang, tabel 2.2 Jumlah Pegawai dari segi pendidikan formal, tabel 2.3 Jumlah pegawai dari segi Jabatan Struktural / Eselon, tabel 2.4 Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja, tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2011 s/d

2022 , tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dari Tahun 2011 s/d 2022 dan tabel 2.7 perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal dari Tahun 2011 s/d 2022.

Tabel II.1.  
Jumlah Pegawai dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

| NO            | PANGKAT / GOLONGAN       | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH    |
|---------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|
|               |                          | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |           |
| 1             | Pembina Utama Muda /IVc  | 1             | -         | 1         |
| 2             | Pembina Tk. I /IVb       | 1             | -         | 1         |
| 3             | Pembina /IVa             | 4             | 2         | 6         |
| 4             | Penata Tk I/III d        | 3             | 7         | 10        |
| 5             | Penata /III c            | 3             | 4         | 7         |
| 6             | Penata Tk I/III b        | 3             | 7         | 10        |
| 7             | Penata Muda/III a        | 6             | 3         | 9         |
| 8             | Pengatur Tk I/II d       | 5             | 2         | 7         |
| 9             | Pengatur/II c            | -             | 1         | 1         |
| 10            | Pengatur Muda Tk I /II b | -             | -         | -         |
| 11            | Pengatur Muda/II a       | -             | -         | -         |
| <b>JUMLAH</b> |                          | <b>26</b>     | <b>26</b> | <b>52</b> |

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel II.2.  
Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal

| NO            | TINGKAT PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH    |
|---------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|
|               |                    | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |           |
| 1             | S2                 | 6             | 3         | 9         |
| 2             | S1                 | 8             | 15        | 23        |
| 3             | D3                 | 3             | 2         | 5         |
| 4             | SMU                | 9             | 6         | 15        |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>30</b>     | <b>26</b> | <b>52</b> |

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel II.3.  
Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural / Eselon

| NO            | TINGKAT ESELON | JABATAN            | JUMLAH    |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|
| 1             | II B           | Kepala Dinas       | 1         |
| 2             | III A          | Sekretaris         | 1         |
| 3             | III B          | Kepala Bidang      | 4         |
| 4             | IV A           | Kepala Seksi/UPTD  | 5         |
| 5             | IV B           | Ka Sub Bag TU UPTD | 3         |
| <b>JUMLAH</b> |                |                    | <b>14</b> |

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel II.4.  
Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja

| GOLONGAN<br>JENIS KELAMIN<br>BIDANG | IV/c     |          | IV/b     |          | IV/a     |          | III/d    |          | III/c    |          | III/b    |          | III/a    |          | II/d     |          | II/c     |          | II/b     |          | II/a     |          | JUMLAH    |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                                     | L        | P        | L        | P        | L        | P        | L        | P        | L        | P        | L        | P        | L        | P        | L        | P        | L        | P        | L        | P        | L        | P        |           |
| Sekretariat                         | 1        | -        | 1        | -        | -        | -        | 2        | -        | 2        | -        | 2        | -        | 2        | 1        | 1        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | 13        |
| Industri                            | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | 1        | -        | -        | 1        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 4         |
| Koperasi & UM                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | 1        | -        | -        | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 4         |
| Perdagangan                         | -        | -        | -        | -        | -        | 2        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | 1        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 6         |
| Pasar                               | -        | -        | -        | -        | 3        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5         |
| UPT Pasar                           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | 1        | -        | -        | 1        | -        | 1        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5         |
| UPT Jasa Usaha Pasar                | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | 1        | -        | 2        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5         |
| UPT Metrologi                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2        | -        | 2        | 2        | 2        | -        | 2        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 10        |
| <b>JUMLAH</b>                       | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>8</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>52</b> |

Sumber : subbag umum dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel II.5.  
Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2011 s/d 2022

| No. | Tahun | Jumlah Pegawai |
|-----|-------|----------------|
| 1   | 2011  | 64             |
| 2   | 2012  | 57             |
| 3   | 2013  | 57             |
| 4   | 2014  | 58             |
| 5   | 2015  | 60             |
| 6   | 2016  | 60             |
| 7   | 2017  | 74             |
| 8   | 2018  | 72             |
| 9   | 2019  | 65             |
| 10  | 2020  | 59             |
| 11  | 2021  | 58             |
| 12  | 2022  | 52             |

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel II.6.  
Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2011 s/d 2022

| No. | Golongan     | Tahun |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |              | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1   | Golongan IV  | 8     | 8    | 10   | 10   | 10   | 8    | 8    | 8    |
| 2   | Golongan III | 39    | 39   | 45   | 42   | 42   | 39   | 38   | 36   |
| 3   | Golongan II  | 13    | 13   | 18   | 19   | 13   | 12   | 12   | 8    |
| 4   | Golongan I   | 0     | 0    | 1    | 1    | -    | -    | -    | -    |

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Tabel II.7.

Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal dari Tahun 2011 s/d 2022

| No            | Tingkat Pendidikan      | Tahun     |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |                         | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| 1             | Tamatan S-2             | 7         | 7         | 10        | 10        | 9         | 9         | 10        | 9         |
| 2             | Tamatan S-1             | 24        | 24        | 25        | 22        | 25        | 23        | 23        | 23        |
| 3             | Tamatan D-III           | 4         | 4         | 7         | 7         | 6         | 6         | 5         | 5         |
| 4             | Tamatan SLTA/ sederajat | 23        | 23        | 31        | 32        | 25        | 21        | 20        | 15        |
| 5             | Tamatan SLTP/ sederajat | 2         | 2         | 1         | 1         | -         | -         | -         | -         |
| 6             | Tamatan SD/ sederajat   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>64</b> | <b>57</b> | <b>55</b> | <b>60</b> | <b>72</b> | <b>65</b> | <b>55</b> | <b>52</b> |

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

### 2.3.2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.8. Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan

| No       | SARANA/ PRASARANA         | JUMLAH   | KONDISI  | KET      |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                  | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1.       | Kantor                    | 1 Gedung | Baik     |          |
| 2.       | Ruang Kadis               | 1 Ruang  | Baik     |          |
| 3.       | Ruang Sekretariat         | 4 Ruang  | Baik     | Bersekat |
| 4.       | Ruang Bid. Perindustrian  | 2 Ruang  | Baik     |          |
| 5.       | Ruang Bid. Perdagangan    | 2 Ruang  | Baik     | Bersekat |
| 6.       | Ruang Bid. Koperasi & UKM | 2 Ruang  | Baik     | Bersekat |
| 7.       | Ruang Bid. Pasar          | 4 Ruang  | Baik     | Bersekat |
| 8.       | Toilet                    | 4 Ruang  | Baik     |          |
| 9.       | Pantri                    | 2 Ruang  | Baik     |          |
| 10.      | Ruang Arsip               | 2 Ruang  | Baik     | Bersekat |
| 11.      | Gudang                    | 2 Ruang  | Baik     |          |

Sumber : Sekretariat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel II.9. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung

| No       | JENIS BARANG      | JUMLAH   | KONDISI  |             |             |
|----------|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|
|          |                   |          | Baik     | Kurang Baik | Rusak Berat |
| <i>1</i> | <i>2</i>          | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i>    | <i>6</i>    |
| 1        | Motor Dinas       | 3        | 3        | -           | -           |
| 2        | Komputer / PC     | 59       | 51       | -           | 8           |
| 3        | Laptop            | 7        | 7        | -           | -           |
| 4        | Telepon           | 1        | 1        | -           | -           |
| 5        | AC Split          | 15       | 14       | -           | 1           |
| 6        | Brankas           | 5        | 3        | -           | 2           |
| 7        | Mesin Ketik       | 22       | 14       | 5           | 3           |
| 8        | Kursi             | 119      | 106      | -           | 13          |
| 9        | Meja Kerja        | 111      | 102      | -           | 9           |
| 10       | Televisi          | 6        | 5        | 1           | -           |
| 11       | Infocus           | 3        | 2        | -           | 1           |
| 12       | Sound System      | 1        | 1        | -           | -           |
| 13       | Faximile          | 1        | 1        | -           | -           |
| 14       | Jaringan Internet | 6        | 1        | -           | -           |

Sumber : Sekretariat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

### 2.3.3. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Tabel 2.10. Alokasi Anggaran Belanja Langsung  
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

| No  | TAHUN<br>ANGGARAN | NILAI (Rp)     |
|-----|-------------------|----------------|
| 1   | 2                 | 3              |
| 1.  | 2008              | 2.544.470.700  |
| 2.  | 2009              | 2.283.246.057  |
| 3.  | 2010              | 2.086.648.882  |
| 4.  | 2011              | 1.993.445.900  |
| 5.  | 2012              | 4.044.748.000  |
| 6.  | 2013              | 73.953.727.092 |
| 7.  | 2014              | 11.468.967.650 |
| 8.  | 2015              | 7.247.227.760  |
| 9.  | 2016              | 8.097.000.882  |
| 10. | 2017              | 10.265.115.400 |
| 11. | 2018              | 9.703.216.346  |
| 12. | 2019              | 11.055.725.224 |
| 13. | 2020              | 18.175.314.922 |
| 14. | 2021              | 12.872.381.707 |
| 15. | 2022              | 20.413.028.266 |
| 16. | 2023              | 15.569.370.318 |

### 2.3. Kinerja Pelayanan

#### 2.3.1. Pelayanan Industri

Pelayanan sektor Industri yang ditangani Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan Menengah atau Industri Rumah Tangga (IKM/IRT)

Pembinaan dan pelatihan IKM/IRT merupakan upaya pengembangan potensi unggulan daerah yang mampu meningkatkan kualitas kemampuan IKM/IRT dan nilai tambah serta menumbuhkembangkan IKM/IRT potensial dengan memanfaatkan sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional maupun global. Kinerja pelayanan pembinaan Tahun 2022 sebanyak 105 IKM/IRT.

- b. Pemeriksaan kelayakan perijinan Industri

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui indikasi pencemaran industri, upaya

pencegahan pencemaran industri oleh pelaku usaha industri, kegiatan produksi, mesin/ peralatan yang digunakan membahayakan pekerja, terdapat safety untuk permesinan, kejelasan tentang asal mula bahan baku yang digunakan, komoditi yang dihasilkan membahayakan masyarakat atau ilegal, pekerjaan dilakukan melewati batas kapasitas mesin/peralatan, dan kegiatan produksi industri yang dilakukan mengganggu masyarakat sekitar. Bilamana pada saat pemeriksaan lapangan operasional industri tidak sesuai peraturan maka di rekomendasikan untuk dikaji ulang perijinannya. Adapun di tahun 2022, jumlah permohonan izin industri dengan resiko tinggi dan menengah adalah 96 izin.

### 2.3.2. Pelayanan Perdagangan

Pembinaan dan pengawasan perdagangan meliputi : Pendataan gudang, Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C, Informasi harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya, serta informasi ketersediaan Stok SEMBAKO dan Barang Penting lainnya. Untuk Informasi Harga Sembako di Kota Pontianak, DKUMP bekerjasama dengan Diskominfo dalam memberikan informasi harga secara digital melalui website ataupun aplikasi JEPIN (Jendela Pontianak Integrasi) pada menu Harga Komoditas.

### 2.3.3. Pelayanan Bidang Pasar

Pelayanan bidang pasar, yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pembinaan pedagang dengan melakukan monitoring di pasar tradisional, berupa pendekatan secara persuasif kepada pedagang yang melanggar peraturan. Untuk pedagang yang tidak mengindahkan peringatan lisan, akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penindakan.
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana berupa monitoring kebersihan di pasar tradisional.
- c. Secara rutin, setiap bulan dilakukan pembersihan terhadap saluran air yang berada di seluruh pasar rakyat yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
- d. Melakukan pendataan kembali terhadap jumlah pedagang dan PKL yang berada di kawasan pasar tradisional yang akan ditata.
- e. Melakukan penarikan retribusi sewa kios dan los di pasar tradisional.
- f. Melakukan penagihan terhadap pedagang yang menunggak biaya retribusi dan pemanfaatan.

TABEL II.11  
 Tarif Retribusi Pasar Tradisional Yang Dibina Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan  
 Perdagangan Kota Pontianak  
 Sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022

| NO       | JENIS BANGUNAN                                   | BESARAN TARIF       |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Penyewaan Bangunan Pasar</b>                  |                     |
| <b>1</b> | <b>Pasar Tengah</b>                              |                     |
| a        | Kios Lt Dasar                                    | Rp.3.000.000,00/th  |
| b        | Kios Lt Satu                                     | Rp.2.000.000,00/th  |
| c        | Los                                              | Rp.2.000.000,00/th  |
|          |                                                  |                     |
| <b>2</b> | <b>Pasar Kenanga Anggrek</b>                     |                     |
| a        | Kios Lt Dasar                                    | Rp.2.160.000,00/th  |
| b        | Los                                              | Rp.1.200.000,00/th  |
|          |                                                  |                     |
| <b>3</b> | <b>Pasar Kenanga Keraton</b>                     |                     |
|          | Los                                              | Rp.440.000,00/th    |
|          |                                                  |                     |
| <b>4</b> | <b>Pasar Belimbing - Jeruju</b>                  |                     |
|          | Los                                              | Rp.1.440.000,00/th  |
|          |                                                  |                     |
| <b>5</b> | <b>Pasar Kapuas Indah</b>                        |                     |
| a        | Kios Lt Dasar Dalam (Blok C,D,E)                 | Rp.400.000,00/M/th  |
| b        | Kios Lt Dasar Luar (Blok A,F,G,H,PS)             | Rp.500.000,00/M/th  |
| c        | Kios Lt Satu Dalam (Blok A,B,C,D,E,F,I)          | Rp.300.000,00/M/th  |
| d        | Kios Lt satu luar (Blok G, H, L)                 | Rp.350.000.00/M/th  |
|          |                                                  |                     |
| <b>6</b> | <b>Pasar AR Hakim</b>                            |                     |
|          | Kios Lt Dasar                                    | Rp.2.520.000,00/th  |
|          |                                                  |                     |
| <b>7</b> | <b>Pasar jl Patimura</b>                         |                     |
|          | Kios Lt Dasar                                    | Rp.600.000.00/M/th  |
|          |                                                  |                     |
| <b>8</b> | <b>Pasar Indragiri Barat dan Indragiri Timur</b> |                     |
|          | Kios Lt Dasar                                    | Rp.450.000.00/M/th  |
|          |                                                  |                     |
| <b>9</b> | <b>Pasar Teratai</b>                             |                     |
| a        | Kios Lt Dasar – menghadap Jl Kom yos Sudarso     | Rp.40.000.000,00/th |
| b        | Kios Lt Dasar – menghadap Jl Ummutalib           | Rp.30.000.000,00/th |
| c        | Kios Lt Dasar-menghadap Jl Aster                 | Rp.25.000.000,00/th |
| d        | Kios Lt Dasar-Menghadap Los                      | Rp.30.000.000,00/th |
| e        | Kios Lt satu Luas s/d 4 M <sup>2</sup>           | Rp.4.000.000,00/th  |
| f        | Kios Lt satu luas > 4 s/d 8 M <sup>2</sup>       | Rp.5.000.000,00/th  |
| g        | Kos Lt satu luas > 8 s/d 11 M <sup>2</sup>       | Rp.6.000.000,00/th  |
| h        | Kios Lt Satu luas > 11 s/d 14 M <sup>2</sup>     | Rp.7.000.000,00/th  |
| i        | Kios Lt satu luas > 14 s/d 17 M <sup>2</sup>     | Rp.8.000.000,00/th  |
| j        | Kios Lt satu luas > 17 s/d 20 M <sup>2</sup>     | Rp.9.000.000,00/th  |
| k        | Kios Lt satu luas > 20 s/d 23 M <sup>2</sup>     | Rp.10.000.000,00/th |
| l        | Kios Lt satu luas > 23 s/d 27 M <sup>2</sup>     | Rp.15.000.000,00/th |

| <b>NO</b> | <b>JENIS BANGUNAN</b>                                                                                   | <b>BESARAN TARIF</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| m         | Kios Lt satu luas > 27 s/d 31 M <sup>2</sup>                                                            | Rp.20.000.000,00/th  |
| n         | Los Lt Dasar s/d 1 M <sup>2</sup>                                                                       | Rp.1.200.000,00/th   |
| o         | Los Lt Dasar > 1 - 3 M <sup>2</sup>                                                                     | Rp. 2.400.000,00/th  |
|           |                                                                                                         |                      |
| <b>10</b> | <b>Pasar Kemuning</b>                                                                                   |                      |
|           | Kios Lt satu                                                                                            | Rp.4.000.000,00/th   |
|           |                                                                                                         |                      |
| <b>B</b>  | <b>Penyewaan Bangunan Pasar Maksimal 20 Tahun</b>                                                       |                      |
| <b>1</b>  | <b>Pasar Flamboyan</b>                                                                                  |                      |
| a         | Kios Lt Dasar (Blok A,B,C)                                                                              | Rp.57.500.000,00     |
| b         | Kios Lt Dasar (Blok A,B,C) ada SPTU                                                                     | Rp.26.250.000,00     |
| c         | Kios Lt Dasar (Blok A1, B1, B28, C1, C33)                                                               | Rp.87.500.000,00     |
| d         | Kios Lt Dasar (Blok D)                                                                                  | Rp.77.500.000,00     |
| e         | Kios Lt Dasar (Blok D1, D16)                                                                            | Rp.110.000.000,00    |
| f         | Kios Lt Dasar (Blok D15, D30)                                                                           | Rp.100.000.000,00    |
| g         | Kios Lt Dasar (Blok E, F)                                                                               | Rp.115.000.000,00    |
| h         | Kios Lt Dasar (Blok E, F) ada SPTU                                                                      | Rp.55.000.000,00     |
| i         | Kios Lt Dasar (Blok E1, E19, E58, E76, F3, F18, F19, F30)                                               | Rp.170.000.000,00    |
| j         | Kios Lt Dasar (Blok E1, E19, E58, E76, F3, F18, F19, F30) ada SPTU                                      | Rp.85.000.000,00     |
| k         | Kios Lt Dasar (Blok E9, E10, E20, E28, E29, E38, E39, E47, E48, E57, E66, E67, F1, F4, F5, F7)          | Rp.150.000.000,00    |
| l         | Kios Lt Dasar (Blok E9, E10, E20, E28, E29, E38, E39, E47, E48, E57, E66, E67, F1, F4, F5, F7) ada SPTU | Rp.75.000.000,00     |
| m         | Los Lt Dasar (Blok A, B, C, D)                                                                          | Rp.10.000.000,00     |
| n         | Los Lt Dasar (Blok A, B, C, D) ada SPTU                                                                 | Rp.5.000.000,00      |
| o         | Los Lt Dasar (Blok E)                                                                                   | Rp.12.000.000,00     |
| p         | Los Lt Dasar (Blok E) ada SPTU                                                                          | Rp.5.500.000,00      |
|           |                                                                                                         |                      |
| <b>2</b>  | <b>Pasar Puring</b>                                                                                     |                      |
| a         | Ruko 2 Lantai                                                                                           | Rp.250.000.000,00    |
| b         | Ruko 2 Lantai (Blok R(2-8), R12, R13, R15, R16, R23, R25, R28, R29, R30)                                | Rp.300.000.000,00    |
| c         | Ruko 2 Lantai (Blok R1)                                                                                 | Rp.150.000.000,00    |
| d         | Ruko 2 Lantai (Blok R9)                                                                                 | Rp.175.000.000,00    |
| e         | Kios Lt Dasar – Punya HGB                                                                               | Rp.6.000.000,00      |
| f         | Kios Lt Dasar – Punya SPTU                                                                              | Rp.11.000.000,00     |
| g         | Kios Lt Dasar – Punya HM                                                                                | Rp.0,00              |
| h         | Los Lt Dasar – Punya SPTU                                                                               | Rp.2.000.000,00      |
| i         | Los Lt Dasar ½ Meja – Punya SPTU                                                                        | Rp.1.000.000,00      |
| j         | Los Lt Dasar                                                                                            | Rp.3.000.000,00      |
| k         | Los Lt Dasar ½ Meja                                                                                     | Rp.1.500.000,00      |
| l         | Los Lt Dasar – Baru                                                                                     | Rp.5.000.000,00      |
| m         | Los Lt Dasar (Blok P)                                                                                   | Rp.2.000.000,00      |
|           |                                                                                                         |                      |
| <b>3</b>  | <b>Pasar Teratai</b>                                                                                    |                      |
| a         | Kios Lt Dasar (Blok AA, BB, FF1, FF24)                                                                  | Rp.40.000.000,00     |

| <b>NO</b> | <b>JENIS BANGUNAN</b>                                    | <b>BESARAN TARIF</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| b         | Kios Lt Dasar (Blok CC)                                  | Rp.35.000.000,00     |
| c         | Kios Lt Dasar (Blok DD(1-11), EE(1-11), FF(2-12))        | Rp.30.000.000,00     |
| d         | Kios Lt Dasar (Blok DD(12-20) EE(12-22) FF(13-21), FF23) | Rp.25.000.000,00     |
| e         | Kios Lt Dasar (Blok EE8)                                 | Rp.45.000.000,00     |
| f         | Kios Lt Dasar (Blok EE(12-14))                           | Rp.50.000.000,00     |
| g         | Kios Lt Dasar (Blok GG3)                                 | Rp.60.000.000,00     |
| h         | Kios Lt Satu (Blok HH, II)                               | Rp.60.000.000,00     |
| i         | Kios Lt Satu (Blok HH, II) khusus Pedagang YUKA          | Rp.30.000.000,00     |
| j         | Kios Lt Satu (Blok JJ)                                   | Rp.65.000.000,00     |
| k         | Kios Lt Satu (Blok KK)                                   | Rp.70.000.000,00     |
| l         | Kios Lt Satu (Blok LL)                                   | Rp.100.000.000,00    |
| m         | Kios Lt Satu (Blok MM)                                   | Rp.120.000.000,00    |
| n         | Los Lt Dasar – Punya SPTU                                | Rp.4.000.000,00      |
| o         | Los Lt Dasar – Tidak Punya SPTU                          | Rp.6.000.000,00      |
| p         | Los Lt Dasar – Pedagang Baru                             | Rp.12.000.000,00     |
|           |                                                          |                      |
| <b>4</b>  | <b>Pasar Kemuning</b>                                    |                      |
| a         | Kios Lt Dasar (Nomor 1, 17, 18, 23)                      | Rp.70.000.000,00     |
| b         | Kios Lt Satu                                             | Rp.60.000.000,00     |
| c         | Los Lt Dasar (Blok A, B) – Punya SPTU                    | Rp.4.000.000,00      |
| d         | Los Lt Dasar (Blok A, B)                                 | Rp.6.000.000,00      |
| e         | Los Lt Dasar (Blok C) – Punya SPTU                       | Rp.5.000.000,00      |
| f         | Los Lt Dasar (Blok D, E)                                 | Rp.5.000.000,00      |
| g         | Los Lt Dasar (Blok D18)                                  | Rp.10.000.000,00     |

**Sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020**

**A. RETRIBUSI BULANAN TOKO**

| <b>NO</b> | <b>JENIS TEMPAT USAHA</b> | <b>BESARAN TARIF</b> |
|-----------|---------------------------|----------------------|
| 1         | Toko berlantai 1          | Rp. 200.000,-/Bulan  |
| 2         | Toko berlantai 2          | Rp. 250.000,-/Bulan  |
| 3         | Toko berlantai 3          | Rp. 350.000,-/Bulan  |

**B. Retribusi pasar diwajibkan bagi orang pribadi, kelompok, perusahaan, badan yang melakukan usaha perdagangan/berjualan di dalam dan diluar bangunan pasar rakyat serta di lingkungan area parkir/halaman pasar rakyat:**

| <b>NO</b> | <b>JENIS TEMPAT USAHA</b> | <b>BESARAN TARIF</b> |
|-----------|---------------------------|----------------------|
| 1         | Kios                      | Rp. 3.000,-/Hari     |
| 2         | Los                       | Rp. 2.000,-/ Hari    |
| 3         | Tenda                     | Rp. 2.000,-/ Hari    |
| 4         | Bakulan / Hampanan        | Rp. 2.000,-/ Hari    |

#### 2.3.4. Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Pelayanan bidang Koperasi dan UKM, yang ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

- a. Pelayanan Penyuluhan pembentukan Koperasi.
- b. Pelayanan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Dinas Koperasi, usaha mikro dan perdagangan Kota Pontianak diberikan kepada Koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam seluruh Indonesia. Bagi Koperasi diluar wilayah Kota Pontianak yang akan membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kota Pontianak harus mengajukan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas beserta administrasi lainnya dan akan dilanjutkan kepada Bapak Walikota Pontianak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI untuk mendapatkan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di Kota Pontianak dan dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Begitu juga sebaliknya Koperasi Kota Pontianak yang akan membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah lainnya seluruh Indonesia harus mendapat persetujuan dari Pejabat yang menangani urusan Koperasi dimana Koperasi tersebut membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dan baru dapat beroperasi setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas dari Walikota Pontianak atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.
- c. Pendataan dan Identifikasi Potensi UKM dilakukan agar para pelaku usaha kecil dan menengah daerah dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing yang ada, maka pelaku-pelaku UKM harus siap menghadang usahanya dengan berbagai strategi, salah satunya adalah meningkatkan peran pembinaan Pemerintah Daerah melalui Lembaga yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, Usaha mikro dan perdagangan Kota Pontianak melalui Pemutakhiran data UKM Kota Pontianak, mempertahankan pangsa pasar yang telah ada sebagai strategi jangka pendek, meningkatkan kualitas dan mutu produk-produk UKM menjadi lebih unggul dari pada produk-produk luar daerah, menembus pasar-pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar sebagai strategi program jangka menengah dan jangka panjang, menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing tinggi, serta mengembangkan usaha yang baru tanpa

mematikan usaha yang telah ada. Pendataan dan Identifikasi Potensi juga untuk mengetahui jumlah UKM dan potensi yang ada pada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dapat dikembangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dimana, dalam PP dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria modal usaha s/d 1 Miliar dan Omset maksimal s/d 2 Miliar; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria modal usaha lebih dari 1 Miliar s/d 5 Miliar dengan omset lebih dari 2 Miliar s/d 15 Miliar; sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dengan modal usaha lebih dari 5 Miliar s/d 10 Miliar dan omzet lebih dari 15 Miliar s/d 50 Miliar. Dengan dilakukannya pendataan secara rutin dan berkala diharapkan program pembinaan, pengembangan tepat sasaran.

- d. Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan Usaha Mikro di Kota Pontianak dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap tahunnya. Pembinaan dan Pengembangan yang dilakukan berupa program Peningkatan Pengembangan Usaha Koperasi, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, dan adanya Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil yang Kondusif. Program-program Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan UKM yang ditangani Dinas Koperasi, Usaha mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi Kegiatan Pameran dan Gelar Produk Koperasi dan UKM, Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM dan Calon Wirausaha. Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melaksanakan program ini bertujuan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan Usaha Mikro sebagai ujung tombak pembangunan dimana pelaku Usaha Mikro dapat bersaing dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dan dapat menembus pasar baru daripada produk yang serupa dari luar daerah, sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Pontianak. Potensi masalah yang banyak dihadapi oleh Usaha Mikro adalah dalam hal : bidang permodalan, bidang pemasaran, bahan baku, tenaga kerja dan manajemen. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi,

Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan ukm sesuai dengan Potensi Masalah sehingga Usaha Mikro diharapkan mampu dan menjadi penyokong utama ekonomi di Kota Pontianak ini. Potensi masalah pada bidang akses pendanaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan Pelatihan Kewirausahaan bekerjasama dengan pihak Perbankan. Pada bidang Pemasaran, kegiatan yang mendukung dengan mengikuti pameran-pameran baik di Provinsi Kalimantan Barat dan di luar Provinsi Kalimantan Barat. Pada bidang Manajemen, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melaksanakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bekerjasama dengan Universitas Negeri di Kota Pontianak.

Tabel II.12

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

| No   | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                                                                                            | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun |           |           |              |              | Realisasi Capaian pada Tahun |           |           |      |      | Rasio Capaian pada Tahun |       |       |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
|      |                                                                                                                                                                       |             |            |                          | 2020                                       | 2021      | 2022      | 2023         | 2024         | 2020                         | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2020                     | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| 1    | 2                                                                                                                                                                     | 3           | 4          | 5                        | 6                                          | 7         | 8         | 9            | 10           | 11                           | 12        | 13        | 14   | 15   | 16                       | 17    | 18    | 19   | 20   |
| I    | Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar                                                                                                                |             |            |                          | 5,88%                                      | 5,88%     | 11,76%    | 11,76%       | 11,76%       | 5,88%                        | 16,67%    | 13,04%    |      |      | 1                        | 2,8   | 1,1   | -    | -    |
| I    | <b>Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan</b>                                                                                              |             |            |                          |                                            |           |           | <b>70%</b>   | <b>75%</b>   |                              |           |           |      |      |                          |       |       |      |      |
| 1    | Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan                                                                                                       |             |            |                          | 11,76%                                     | 11,76%    | 35,29%    | 44,12%       | 50,00%       | 11,76%                       | 11,76%    | 34,78%    |      |      | 1                        | 1     | 0,99  | -    | -    |
| II   | Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan                                                                                                                       |             |            |                          | 100%                                       | 100%      | 100%      | 100%         | 100%         | 100%                         | 100%      | 100%      |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| II   | <b>Persentase stok sembako dan barang penting lainnya</b>                                                                                                             |             |            |                          |                                            |           |           | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  |                              |           |           |      |      |                          |       |       |      |      |
| 1    | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan ( IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan                                  |             |            |                          | 100%                                       | 100%      | 100%      | 100%         | 100%         | 100%                         | 100%      | 100%      |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| 2    | Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting                                                                                                   |             |            |                          | 83%                                        | 83%       | 92%       | 92%          | 100%         | 83%                          | 92%       | 92%       |      |      | 1                        | 1,1   | 1     | -    | -    |
| III  | Volume Ekspor ( ton )                                                                                                                                                 |             |            |                          | 554.354                                    | 554.354   | 575.906   | 580.360      | 610.880      | 554.354                      | 1195.801  | 1195.801  |      |      | 1                        | 20,20 | 19,44 | -    | -    |
| 1    | Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina                                                                                                                            |             |            |                          | 39%                                        | 39%       | 24%       | 27%          | 38%          | 39%                          | 39%       | 24%       |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| IV   | Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti                                                                                               |             |            |                          | 100%                                       | 100%      | 100%      | 100%         | 100%         | 100%                         | 100%      | 100%      |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| 1    | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTPP ) bertanda tera sah yang berlaku                                                                 |             |            |                          | 97%                                        | 97%       | 97%       | 98%          | 99%          | 97%                          | 100%      | 100%      |      |      | 1                        | 1,0   | 1,0   | -    | -    |
| V    | Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                          |             |            |                          | 40%                                        | 40%       | 40%       | 50%          | 60%          | 40%                          | 40%       | 40%       |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| 1    | Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.                                                                |             |            |                          | 100%                                       | 100%      | 100%      | 100%         | 100%         | 100%                         | 100%      | 100%      |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| VI   | persentase peningkatan jumlah sarana prasarana kluster Industri                                                                                                       |             |            |                          | 25%                                        | 25%       | 26%       | 27%          | 28%          | 25%                          | 16,67%    | 33%       |      |      | 1                        | 0,67  | 1,27  | -    | -    |
| III  | <b>Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil</b>                                                                                                            |             |            |                          |                                            |           |           | <b>2,42%</b> | <b>2,5%</b>  |                              |           |           |      |      |                          |       |       |      |      |
|      | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP                             |             |            |                          | 100%                                       | 100%      | 100%      | 100%         | 100%         | 100%                         | 100%      | 100%      |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| VII  | Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan                                                                                                                 |             |            |                          | 90%                                        | 90%       | 90%       | 90%          | 90%          | 90%                          | 85%       | 100%      |      |      | 1                        | 0,94  | 1,11  | -    | -    |
| 1    | 1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota                                                                                                             |             |            |                          | 2,47%                                      | 2,47%     | 2,50%     | 2,60%        | 2,60%        | 2,47%                        | 3,38%     | 3,49%     |      |      | 1                        | 1,37  | 1,40  | -    | -    |
| 2    | 2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait       |             |            |                          | 64,85%                                     | 64,85%    | 65%       | 70%          | 75%          | 64,85%                       | 64,85%    | 65%       |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| 3    | 03. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait |             |            |                          | 100%                                       | 100%      | 100%      | 100%         | 100%         | 100%                         | 100%      | 100%      |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| VIII | Persentase pertumbuhan industri                                                                                                                                       |             |            |                          | 2,18%                                      | 2,18%     | 2,36%     | 2,42%        | 2,50%        | 2,18%                        | 3,38%     | 3,49%     |      |      | 1                        | 1,55  | 1,48  | -    | -    |
| 1    | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                             |             |            |                          | 1 dokumen                                  | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen    | 1 dokumen    | 1 dokumen                    | 1 dokumen | 1 dokumen |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| IX   | persentase koperasi aktif                                                                                                                                             |             |            |                          | 95,40%                                     | 95,40%    | 95,80%    | 96%          | 97%          | 95,40%                       | 94,72%    | 94,72%    |      |      | 1                        | 0,99  | 0,99  | -    | -    |
| IV   | <b>persentase koperasi aktif</b>                                                                                                                                      |             |            |                          |                                            |           |           | <b>96%</b>   | <b>97%</b>   |                              |           |           |      |      |                          |       |       |      |      |
|      | Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam                                                                                                                       |             |            |                          | 0,57%                                      | 0,57%     | 0,96%     | 1,15%        | 1,53%        | 0,57%                        | 1,17%     | 0,96%     |      |      | 1                        | 2,04  | 1,00  | -    | -    |
|      | Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi                                                                                                            |             |            |                          | 19%                                        | 19%       | 19%       | 29%          | 38%          | 19%                          | 14,48%    | 18,92%    |      |      | 1                        | 0,76  | 0,99  | -    | -    |
|      | Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                                                                                                                       |             |            |                          | 19%                                        | 31%       | 23%       | 23%          | 29%          | 19%                          | 31%       | 19,00%    |      |      | 1                        | 1     | 0,83  | -    | -    |
|      | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                                                                                                     |             |            |                          | 10%                                        | 10%       | 23%       | 14%          | 19%          | 10%                          | 10%       | 23%       |      |      | 1                        | 1     | 1     | -    | -    |
| X    | Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru                                                                                                                               |             |            |                          | 4,22%                                      | 4,22%     | 4,30%     | 4,50%        | 5,00%        | 4,22%                        | 7,17%     | 4,48%     |      |      | 1                        | 1,70  | 1,04  | -    | -    |
| V    | <b>Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru</b>                                                                                                                        |             |            |                          |                                            |           |           | <b>4,50%</b> | <b>5,00%</b> |                              |           |           |      |      |                          |       |       |      |      |
|      | Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan                                                                                                                              |             |            |                          | 3%                                         | 3%        | 5%        | 9%           | 12%          | 3%                           | 3%        | 3%        |      |      | 1                        | 1     | 0,67  | -    | -    |
|      | Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya                                                                                                                  |             |            |                          | 2%                                         | 2%        | 3%        | 5%           | 7%           | 2%                           | 2%        | 2%        |      |      | 1                        | 1     | 0,5   | -    | -    |

Tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

| No | Uraian                                                                           | Anggaran pada Tahun |                   |                   |                   |      | Realisasi Anggaran pada Tahun |                   |                   |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
|    |                                                                                  | 2020                | 2021              | 2022              | 2023              | 2024 | 2020                          | 2021              | 2022              | 2023 | 2024 | 2020                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran (%)          | Realisasi (%) |
| 1  | 2                                                                                | 3                   | 4                 | 5                 | 6                 | 7    | 8                             | 9                 | 10                | 11   | 12   | 13                                        | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                    | 19            |
|    | PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH | Rp -                |                   |                   |                   | -    | Rp -                          |                   |                   | -    | -    |                                           |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH      | Rp 60.130.000       |                   |                   |                   |      | Rp 60.030.000                 |                   |                   |      |      | 1,00                                      |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (KUMKM)      | Rp -                |                   |                   |                   |      | Rp -                          |                   |                   |      |      |                                           |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM                        | Rp 448.033.020      |                   |                   |                   |      | Rp 423.522.723                |                   |                   |      |      | 0,95                                      |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA                                             | Rp 52.526.425       |                   |                   |                   |      | Rp 52.490.000                 |                   |                   |      |      | 1,00                                      |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR                                      | Rp 1.331.500        |                   |                   |                   |      | Rp 1.331.500                  |                   |                   |      |      | 1,00                                      |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL                                     | Rp 3.710.458.100    |                   |                   |                   |      | Rp 3.563.920.192              |                   |                   |      |      | 0,96                                      |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI                           | Rp 38.808.900       |                   |                   |                   |      | Rp 38.803.500                 |                   |                   |      |      | 1,00                                      |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN                         | Rp 2.268.275.750    |                   |                   |                   |      | Rp 2.261.287.378              |                   |                   |      |      | 1,00                                      |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF                                            | Rp 44.184.000       |                   |                   |                   |      | Rp 44.184.000                 |                   |                   |      |      | 1,00                                      |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA ARGO DAN HASIL HUTAN (KAAHH)                         | Rp -                |                   |                   |                   |      | Rp -                          |                   |                   |      |      |                                           |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA                          | Rp 500.000          |                   |                   |                   |      | Rp 500.000                    |                   |                   |      |      | 1,00                                      |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                      | Rp 11.551.067.227   | Rp 9.274.506.158  | Rp 9.360.362.966  | Rp 9.500.329.114  |      | Rp 10.239.244.263             | Rp 8.877.283.339  | Rp 8.795.338.606  |      |      | 0,89                                      | 0,96 | 0,94 | -    | -    | -5,76                 | -7,11         |
|    | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                |                     | Rp 2.312.089.341  | Rp 2.440.423.000  | Rp 3.543.345.500  |      |                               | Rp 2.303.376.750  | Rp 2.395.839.267  |      |      |                                           | 1,00 | 0,98 | -    | -    | 25,37                 | 4,01          |
|    | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                     |                     | Rp 38.940.000     | Rp 52.035.000     | Rp 15.188.900     |      |                               | Rp 35.189.000     | Rp 47.955.000     |      |      |                                           | 0,90 | 0,92 | -    | -    | -18,59                | 36,28         |
|    | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING              |                     | Rp 86.963.300     | Rp 5.694.867.200  | Rp 94.364.900     |      |                               | Rp 85.137.249     | Rp 2.334.850.200  |      |      |                                           | 0,98 | 0,41 | -    | -    | 3175,12               | 2642,45       |
|    | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                      |                     | Rp -              |                   |                   |      |                               | Rp -              |                   |      |      |                                           |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                  |                     | Rp 355.845.181    | Rp 405.325.000    | Rp 345.852.910    |      |                               | Rp 345.027.065    | Rp 396.238.762    |      |      |                                           | 0,97 | 0,98 | -    | -    | -0,38                 | 14,84         |
|    | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                             |                     | Rp -              | Rp 9.357.000      | Rp 10.000.000     |      |                               | Rp -              | Rp -              |      |      |                                           |      | 0,00 | -    | -    |                       |               |
|    | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                     |                     | Rp 170.755.250    | Rp 387.224.100    | Rp 142.813.900    |      |                               | Rp 165.325.400    | Rp 279.980.320    |      |      |                                           | 0,97 | 0,72 | -    | -    | 31,83                 | 69,35         |
|    | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA                          |                     | Rp 3.201.000      | Rp 3.200.000      | Rp 900.200        |      |                               | Rp 3.195.000      | Rp 2.900.000      |      |      |                                           | 1,00 | 0,91 | -    | -    | -35,95                | -9,23         |
|    | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                           |                     | Rp -              | Rp 6.443.800      | Rp 5.443.500      |      |                               | Rp -              | Rp 5.963.800      |      |      |                                           |      | 0,93 | -    | -    |                       |               |
|    | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                       |                     | Rp -              | Rp -              |                   |      |                               | Rp -              | Rp -              |      |      |                                           |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                      |                     | Rp 16.846.838     | Rp 36.823.200     | Rp 18.848.000     |      |                               | Rp 15.908.000     | Rp 29.838.000     |      |      |                                           | 0,94 | 0,81 | -    | -    | 34,88                 | 87,57         |
|    | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                     |                     | Rp -              | Rp 7.305.800      | Rp 2.670.700      |      |                               | Rp -              | Rp 6.285.800      |      |      |                                           |      | 0,86 | -    | -    |                       |               |
|    | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                     |                     | Rp 394.448.639    | Rp 400.800.000    | Rp 427.259.700    |      |                               | Rp 394.448.430    | Rp 399.600.140    |      |      |                                           | 1,00 | 1,00 | -    | -    | 4,11                  | 1,31          |
|    | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                   |                     | Rp -              | Rp -              | Rp 3.728.800      |      |                               | Rp -              | Rp -              |      |      |                                           |      | -    | -    |      |                       |               |
|    | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)         |                     | Rp 18.000.000     | Rp 12.700.000     | Rp 12.700.000     |      |                               | Rp 18.000.000     | Rp 10.450.000     |      |      |                                           | 1,00 | 0,82 | -    | -    | -14,72                | -41,94        |
|    | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                        |                     | Rp 200.786.000    | Rp 1.596.161.200  | Rp 1.445.924.194  |      |                               | Rp 198.924.194    | Rp 1.588.693.000  |      |      |                                           | 0,99 | 1,00 | -    | -    | 342,77                | 698,64        |
|    | TOTAL                                                                            | Rp 18.175.314.922   | Rp 12.872.381.707 | Rp 20.413.028.266 | Rp 15.569.370.318 | Rp - | Rp 16.685.313.556             | Rp 12.441.814.427 | Rp 16.293.932.895 | Rp - | Rp - | 0,92                                      | 0,97 | 0,80 | -    | -    | 1,89                  | 2,76          |

#### 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak memiliki sasaran layanan yakni Koperasi, pelaku Usaha Mikro, pelaku Industri Kecil Menengah, usaha Perdagangan serta pedagang Pasar Rakyat binaan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DKUMP Kota Pontianak juga diberi dukungan dari mitra seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), Perum Bulog dll.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

**3.1. Permasalahan**

Tabel III.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok                                          | Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                     | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kualitas Produk Industri belum memenuhi standar global | Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk seperti sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan PIRT, dll                                                                                                     | Tidak ada jaminan kepada konsumen akan kualitas produk sehingga menimbulkan ketidakpercayaan konsumen. Produk sulit menembus pasar global.                                                                                                                                                                      |
| 2  | Kualitas SDM pelaku Industri                           | Pelaku industri di Kota Pontianak tumbuh berkembang dengan peralatan/mesin seadanya, penguasaan teknologi, penguasaan desain dan rancang bangun pengembangan industri masih rendah.                                                                                         | Skala usaha tidak berkembang, pendapatan cenderung konstan, kesejahteraan tidak dapat ditingkatkan, PDRB sektor Industri sulit ditingkatkan.                                                                                                                                                                    |
| 3  | Akses Permodalan                                       | Belum tersedianya perbankan yang khusus ditunjuk pemerintah untuk pembangunan industri per sektor (misalnya: bank khusus untuk agro, untuk industri, untuk migas, untuk IKM, dan lain sebagainya), dengan tingkat bunga kompetitif, serta masih belum optimalnya peran CSR. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Digitalisasi industri dan UMKM                         | Digitalisasi industri bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah yang memberikan peluang untuk berkembang                                                                                                                                      | Transformasi digital mendukung pembangunan industri yang inklusif (menciptakan asas dan kesempatan yang luas secara berkeadilan) dan berkelanjutan dengan memperbesar partisipasi pelaku UMKM dalam global value chain serta memperkuat SDM sektor IKM sehingga bisa naik kelas, semakin maju dan berdaya saing |
| 5  | <i>Green Industry</i>                                  | mendorong berjalannya ekonomi sirkular, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui industri hijau                                                                                                                                                            | penghematan/efisiensi penggunaan sumberdaya alam untuk pembangunan yang berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | Inflasi global                                         | Inflasi yang dialami hampir semua negara menyebabkan terjadinya peningkatan harga bahan baku industri                                                                                                                                                                       | Terjadi peningkatan biaya produksi dan biaya logistik yang apabila diatasi dengan meningkatkan harga jual produk akan menimbulkan risiko kehilangan sebagian konsumen/pelanggan, di sisi lain apabila menekan harga jual akan menyebabkan berkurangnya keuntungan.                                              |
| 7  | Kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik                   | Kenaikan BBM dan TDL dapat meningkatkan biaya operasional                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Hilirisasi Industri                                    | Perdagangan luar negeri (ekspor) masih didominasi oleh produk hulu (bahan mentah)                                                                                                                                                                                           | Meningkatkan nilai tambah sehingga harga jual dapat ditingkatkan dan pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                                                                                                                                                         |

| No | Masalah Pokok                                                               | Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Distribusi Perdagangan                                                      | Perdagangan dalam negeri menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi di dalam negeri masih rendah yang ditandai dengan margin distribusi perdagangan dalam negeri juga masih relatif sangat berfluktuatif. Hal ini disebabkan karena tingkat integrasi perdagangan di 3 (tiga) tingkatan akhir : Pasar, pengumpul, Grosir dan Eceran masih lemah. Kondisi tersebut sangat rawan di Kalbar khususnya Pontianak karena produk-produk konsumsi di Pontianak utamanya berasal dari luar Pontianak bahkan dari negara tetangga. Padahal sistem logistik Kota Pontianak sangat tidak efisien karena pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang tidak layak/memadai. | Rentan terhadap Inflasi                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Perlindungan Konsumen                                                       | Kegiatan Perlindungan Konsumen masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi/kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.                                                                                                                                               | Rendahnya perlindungan konsumen menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen terhadap kerugian yang mungkin diderita apabila penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum |
| 11 | Kebersihan dan Kenyamanan di Pasar Tradisional                              | Pasar tradisional masih banyak yang belum memenuhi SNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pasar yang bersih, sehat, tidak kotor, dan tidak kumuh akan menimbulkan kenyamanan bagi penjual, pembeli dan masyarakat pengguna lainnya.                                                                                       |
| 12 | Optimalisasi pemanfaatan kios lantai dua pada Pasar tradisional yang kosong | Pedagang enggan menempati lantai dua pada pasar tradisional karena jarang ada pengunjung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pemanfaatan Aset tidak optimal, terjadi kelebihan kapasitas pedagang di lantai dasar sehingga menimbulkan kekumuhan                                                                                                             |
| 13 | Dukungan Sarana Prasarana Pasar                                             | Masih ada pasar yang dibangun namun belum memiliki sarana prasarana pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pedagang dan Pengunjung enggan memanfaatkan pasar yang sudah dibangun                                                                                                                                                           |
| 14 | Kelembagaan UMKM                                                            | Mayoritas UMKM yang berbentuk usaha perorangan masih dikelola secara tertutup dan belum memiliki legalitas usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Skala usaha yang sulit berkembang                                                                                                                                                                                               |

| No | Masalah Pokok                                         | Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Kelembagaan dan SDM Koperasi                          | Rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi, rendahnya partisipasi anggota serta rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rendahnya kapasitas dan kualitas pengelola koperasi menyebabkan pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi. Semakin menurunnya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan Legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi |
| 16 | Akses Koperasi dan UMKM terhadap Sumberdaya Produktif | Keterbatasan akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif seperti bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya. Upaya pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah maupun antara pusat dan daerah. | Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumberdaya produktif berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

#### 3.2.1 Isu Strategis Bidang Industri

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang industri, sebagai berikut:

Perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu yang relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil.

Penguatan sisi produksi baik itu untuk barang konsumsi sektor primer misalnya pertanian, juga untuk barang-barang industri (olahan) belum optimal.

Banyak pelaku industri yang mengalami kendala dalam pembuatan Izin. Izin Mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar

desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan letak lokasi bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Kendala teknis yang dihadapi pelaku industri dalam pengurusan perijinan yaitu gambar bangunan industri, waktu penyelesaian izin yang belum tepat waktu, diskriminatif dalam proses pengurusan perijinan, tidak transparansi biaya pengurusan ijin, birokrasi yang belum pro-bisnis dan masih ada pungutan liar dalam perijinan industri.

Pelaku industri juga masih kurang peduli dengan arti penting perijinan industri, seperti sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan PIRT. Kegiatan usaha yang berkaitan dengan pangan di Kota Pontianak mencantumkan label halal tanpa mengajukan pendaftaran ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaku industri di Kota Pontianak tumbuh berkembang dengan peralatan/mesin seadanya, penguasaan teknologi, penguasaan desain dan rancang bangun pengembangan industri masih rendah.

Pertumbuhan IRT/IKM terus bertambah, tidak diimbangi dengan jumlah tenaga Pembina di sektor industri, sehingga banyak industri kurang terpantau apakah masih aktif beroperasi, penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan minuman.

Sektor industri masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja yang memiliki rantai pendek sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Industri dimaksud lebih menekankan penggunaan tenaga manusia untuk melakukan pemrosesan tahap awal yang berupa sedikit peningkatan mutu komoditas tanpa mengubah menjadi produk olahan. Dan masalah perburuhan (pesangon, premi Jamsostek, UMR dan lain-lain).

Belum tersedianya perbankan yang khusus ditunjuk pemerintah untuk pembangunan industri per sektor (misalnya: bank khusus untuk agro, untuk industri, untuk migas, untuk IKM, dan lain sebagainya), dengan tingkat bunga kompetitif.

### 3.2.2 Isu Strategis Bidang Perdagangan

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang perdagangan adalah sebagai berikut :

Perdagangan luar negeri Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh produk-produk hulu dengan dominasi beberapa komoditi (yaitu karet, kayu). Total nilai dan volume ekspor Kalbar juga masih sangat fluktuatif dan tergantung pada Negara tujuan ekspor tradisional seperti US, China, Korea, Jepang, dan Singapura).

Penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan akses-akses negatif terhadap perdagangan dalam negeri (merembesnya bahan pangan ilegal dari negara tetangga ke Kalbar seperti gula) dan industri dalam negeri (merembesnya bokar ke negara tetangga).

Perdagangan dalam negeri menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi distribusi di dalam negeri masih rendah yang ditandai dengan margin distribusi perdagangan dalam negeri juga masih relative sangat berfluktuatif. Hal ini disebabkan karena tingkat integrasi perdagangan di 3 (tiga) tingkatan akhir : Pasar, pengumpul, Grosir dan Eceran masih lemah. Kondisi tersebut sangat rawan di kalbar khususnya Pontianak karena produk-produk konsumsi di Pontianak utamanya berasal dari luar (Pontianak) bahkan negara tetangga) . Padahal sistim logistik Kota Pontianak sangat tidak efisien karena pelabuhan dan infrastruktur lainnya yang tidak layak/memadai. Akibatnya inflasi selalu tinggi (diatas nasional) dan pertumbuhan ekonomi dibawah pertumbuhan nasional. Kegiatan Perlindungan Konsumen Kalimantan Barat masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah belum operasionalnya lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), belum sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi/ kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.

### 3.2.3 Isu Strategis Bidang Pasar

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang pasar adalah sebagai berikut :

Tidak tertibnya para pedagang dalam membuang sampah, limbah yang dihasilkan dari aktivitas usaha yang dilakukan pedagang dalam sehari sangat besar dan diperparahkan lagi dengan kebiasaan pedagang yang membuang limbah sembarangan, hal ini akan membuat pasar menjadi kumuh, kotor dan tidak sehat.

Ketidaksesuaian beban kerja antara petugas yang dikontrak dengan luas pasar yang ditangani. Pengelolaan kebersihan pasar diserahkan kepada petugas pekerja harian lepas dengan kontrak dan pembagian petugas tidak sebanding dengan pasar yang ditangani.

Lantai los pasar serta saluran air (drainase) banyak yang rusak serta sumbat sehingga pasar menjadi kumuh dan kotor akibat dari kurang berfungsi IPAL, Pembuatan penutup saluran air secara permanent dari bahan semen cor sehingga jika terjadi penyumbatan saluran tidak dapat diketahui.

Terbatasnya personil pemungut retribusi pasar. Sumber PAD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah retribusi pasar, dan keterbatasan personil membawa dampak realisasi pencapaian target yang ditetapkan.

### 3.2.4 Isu Strategis Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

Masih banyaknya usaha mikro yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan Luas, terlebih bagi wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur. Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi karena rendah pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dan rendahnya partisipasi anggota dalam usaha Koperasi, tetapi juga dapat dilihat dan rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif. Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi. Semakin rneburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan Legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi, adalah persoalan-persoalan akut yang perlu segera ditangani. Sementara harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada masyarakat, karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan.

Koperasi dan UMKM juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kebanyakan SDM Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Langkah perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan kurikulum dan pelaksanaan diklat serta revitalisasi lembaga diklat. Hal ini perlu disadari sedari dini, karena sebagai penopang penciptaan wirausaha baru, jumlah dan keberadaan lembaga pengembangan usaha, Lembaga diklat dan inkubator sangat sedikit dan jauh dan memadai. Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi

sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya. Upaya pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah maupun antara pusat dan daerah. Kondisi di atas telah berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM. Terlebih Koperasi dan UMKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal, atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan aparatur dan sarana-prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini terdapat kenyataan bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan UMKM. Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi karyawan perlu dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan Strata 2 (S2-Magister) dan Strata 3 (S3-Doktorat). Keahlian khusus bagi aparatur juga perlu ditingkatkan, khususnya dilakukan diklat pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, diklat aparatur dan diklat motivasi. Searah dengan hal tersebut, sangat diperlukan sarana dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan Koperasi serta bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) aparatur di lingkungan Pemerintah Kota yang sangat dinamis. Di sisi lain berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan bidang perkoperasian dan manajemen usaha.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 3 (tiga) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM di Kota Pontianak. Adapun tujuan RPD yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah Tujuan ke empat yaitu : “Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan Yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan”. Rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 adalah : **”Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri”**. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator:

1. Laju PDRB Sektor Perdagangan
2. Laju PDRB Sektor Industri
3. Tingkat Inflasi.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam jangka waktu tahunan, sampai tiga tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran RPD yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Rumusan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 adalah:

#### **1. Meningkatkan Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan.

#### **2. Meningkatkan pelaku industri Kecil.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil.

#### **3. Meningkatkan Koperasi yang Aktif.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Koperasi Aktif.

#### **4. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:  
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru.

#### **5. Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:  
Persentase Tingkat Kecukupan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1

## Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

| Tujuan                                                   | Sasaran                                                       | Indikator                                                          | Formula Indikator Tujuan / Sasaran                                                                                                                              | Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran pada Tahun ke-                     |        |        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                          |                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                 | 2024                                                                           | 2025   | 2026   |
| Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri |                                                               | 1. Laju PDRB sektor Perdagangan                                    | Sumber data Kota Pontianak dalam Angka dari BPS : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pontianak | 4,98%                                                                          | 4,99%  | 5,00%  |
|                                                          |                                                               | 2. Laju PDRB sektor Industri                                       | Sumber data Kota Pontianak dalam Angka dari BPS : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pontianak | 4,75%                                                                          | 4,77%  | 4,80%  |
|                                                          | Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan | Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan  | $= \frac{\sum \text{Sarana Distribusi Perdagangan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia}} \times 100\%$                    | 75%                                                                            | 80%    | 85%    |
|                                                          | Meningkatnya Pelaku Industri Kecil                            | Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil                | $= \frac{\sum \text{Industri tahun } n - \sum \text{Industri tahun } n_{-1}}{\sum \text{Industri tahun } n_{-1}} \times 100\%$                                  | 2,50%                                                                          | 2,60%  | 2,80%  |
|                                                          | Meningkatnya Koperasi yang Aktif                              | Persentase Koperasi Aktif                                          | $= \frac{\sum \text{Koperasi Aktif}}{\sum \text{Koperasi Seluruhnya} - \sum \text{Koperasi yang dibubarkan}} \times 100\%$                                      | 97,00%                                                                         | 97,50% | 98,00% |
|                                                          | Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro                         | Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru                            | $= \frac{\sum \text{Usaha Mikro tahun } n - \sum \text{Usaha Mikro tahun } n_{-1}}{\sum \text{Usaha Mikro tahun } n_{-1}} \times 100\%$                         | 5,00%                                                                          | 5,50%  | 6,00%  |
|                                                          |                                                               | 3. Tingkat Inflasi                                                 | Sumber Data Bank Indonesia                                                                                                                                      | 3±1                                                                            | 3±1    | 3±1    |
|                                                          |                                                               | Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya | Persentase tingkat kecukupan stok sembako dan barang penting lainnya                                                                                            | $= \frac{\text{Stok Awal} + \text{Pengadaan}}{\text{Penyaluran}} \times 100\%$ | 100%   | 100%   |

## 4.2. Cascading Kinerja

Tabel IV.2  
Berikut Tabel Cascading Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

| Tujuan PD | Sasaran PD                                                      | Indikator Tujuan dan Sasaran PD                                   | Program                                             | Kinerja Program                           | Indikator Program                                                                                                                         | Kegiatan                                                                                    | Kinerja Kegiatan                                                        | Indikator Kegiatan                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                        | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                 | Penanggung Jawab     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1         | 2                                                               | 3                                                                 | 4                                                   | 5                                         | 6                                                                                                                                         | 7                                                                                           | 8                                                                       | 9                                                                                                | 10                                                                                                                  | 11                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                     | 13                   |
| 1         | Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan industri        | 1 Laju PDRB sektor Perdagangan<br>2 Laju PDRB sektor Industri     | 1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan                                                                           | 1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                 | Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola                                  | 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                          | Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                          | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                   | Bidang Pasar         |
|           | 1 Meningkatkan Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan | Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan |                                                     |                                           |                                                                                                                                           | 2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan                      | Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | 2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                              | Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                   | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                            |                      |
|           |                                                                 |                                                                   |                                                     |                                           |                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                         |                                                                                                  | 3 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                         |                      |
|           |                                                                 |                                                                   |                                                     |                                           |                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                         |                                                                                                  | 4 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                              | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                       |                      |
|           | 2 Meningkatkan pelaku industri kecil                            | Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil               | 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI      | Perencanaan dan Pembangunan Industri      | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | 3 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                       | Tersusunnya Dokumen RPIK                                                | Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  | 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Bidang Perindustrian |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program                                                   | Kinerja Program                      | Indikator Program                                                                                                                                            | Kegiatan                                                                                                                                                                             | Kinerja Kegiatan               | Indikator Kegiatan                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penanggung Jawab     |
|-----------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4                                                         | 5                                    | 6                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                    | 8                              | 9                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13                   |
|           |            |                                 | 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Izin Usaha Industri sesuai ketentuan | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait | 4 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Izin Industri sesuai ketentuan | jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri | 6 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri<br>7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri<br>8 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat<br>9 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri<br>10 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri<br>Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri<br>Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat<br>Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri<br>Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri<br>Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Bidang Perindustrian |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program                                                  | Kinerja Program                        | Indikator Program                                    | Kegiatan                                                                                                         | Kinerja Kegiatan               | Indikator Kegiatan                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Penanggung Jawab     |
|-----------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4                                                        | 5                                      | 6                                                    | 7                                                                                                                | 8                              | 9                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                   | 13                   |
|           |            |                                 | 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Informasi Industri terupdate di SIINAS | Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri | 5 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Informasi industri | Persentase industri terdata dalam SIINAS | 11 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |                      |
|           |            |                                 |                                                          |                                        |                                                      |                                                                                                                  |                                |                                          | 12 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                              | Terantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                                                                     |                      |
|           |            |                                 |                                                          |                                        |                                                      |                                                                                                                  |                                |                                          | 13 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas                                                                                                                                                                                                      | Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                   | Bidang Perindustrian |

| Tujuan PD | Sasaran PD                         | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program                                      | Kinerja Program                                     | Indikator Program                              | Kegiatan                                                                                                                                                               | Kinerja Kegiatan                                                        | Indikator Kegiatan           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Penanggung Jawab                |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1         | 2                                  | 3                               | 4                                            | 5                                                   | 6                                              | 7                                                                                                                                                                      | 8                                                                       | 9                            | 10                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                  | 13                              |
|           | 3 Meningkatnya Koperasi yang Aktif | Persentase Koperasi Aktif       | 5 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Terselenggaranya pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam | 6 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                            | Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi              | Jumlah izin yang diterbitkan | 14 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                          | Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                  |                                 |
|           |                                    |                                 |                                              |                                                     |                                                | 7 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penerbitan Izin Pembukaan Kacab, capem dan Kantor Kas KSP | jumlah izin yang diterbitkan | 15 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro |
|           |                                    |                                 |                                              |                                                     |                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                         |                              | 16 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                   | Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                         | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   |                                 |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program                                        | Kinerja Program                                   | Indikator Program                                                               | Kegiatan                                                                                                                                           | Kinerja Kegiatan                                   | Indikator Kegiatan                        | Sub Kegiatan                                                                                                | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Sub Kegiatan                                              | Penanggung Jawab                |
|-----------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4                                              | 5                                                 | 6                                                                               | 7                                                                                                                                                  | 8                                                  | 9                                         | 10                                                                                                          | 11                                                                                                        | 12                                                                  | 13                              |
|           |            |                                 | 6 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI  | Koperasi sesuai ketentuan perkoperasian           | Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan                                | 8 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Movev Koperasi, KSP/USP              | Jumlah Koperasi yang di periksa dan awasi | 17 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan     | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro |
|           |            |                                 | 7 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Meningkatnya KSP/USP yang bernilai SEHAT          | Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT                                          | 9 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Jumlah KSP/USP yang bernilai SEHAT        | 18 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro |
|           |            |                                 | 8 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian | 10 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                         | Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Jumlah anggota Koperasi yang dilatih      | 19 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan       | Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan   | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan                  | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro |
|           |            |                                 |                                                |                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                    |                                           | 20 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi          | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi          | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                  | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD           | Program                                                                     | Kinerja Program                                     | Indikator Program                                                                 | Kegiatan                                                                                                                                                            | Kinerja Kegiatan                                     | Indikator Kegiatan                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Penanggung Jawab                |
|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1         | 2          | 3                                         | 4                                                                           | 5                                                   | 6                                                                                 | 7                                                                                                                                                                   | 8                                                    | 9                                                         | 10                                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                                            | 13                              |
|           | 4          | Meningkatnya Pertumbuhan usaha mikro baru | 9 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                            | Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi | 11 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi | 21 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro |
|           |            |                                           | 10 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Meningkatnya pemberdayaan usaha Mikro               | Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan                                          | 12 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Terlaksananya pemberdayaan usaha mikro               | Jumlah usaha mikro yang diberdayakan                      | 22 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                 | Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                               | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro |
|           |            |                                           |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                           | 23 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                 | Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                      | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                                                           |                                 |
|           |            |                                           |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                           | 24 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                              | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                        | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                                                         |                                 |
|           |            |                                           |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                           | 25 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                             | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                   |                                 |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program                                                        | Kinerja Program                                                  | Indikator Program                                          | Kegiatan                                                                                 | Kinerja Kegiatan                                                              | Indikator Kegiatan                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab                |
|-----------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4                                                              | 5                                                                | 6                                                          | 7                                                                                        | 8                                                                             | 9                                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                              |
|           |            |                                 | 11 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                   | Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro                            | Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya       | 13 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro                                        | Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro | 26 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan<br>27 Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                            | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan<br>Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya                                                                                                                                                                                                    | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan<br>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bidang Koperasi dan Usaha Mikro |
|           |            |                                 | 12 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 14 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | 28 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>29 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>30 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>31 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>32 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sekretariat                     |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program | Kinerja Program | Indikator Program | Kegiatan                                                  | Kinerja Kegiatan                                                   | Indikator Kegiatan                                                            | Sub Kegiatan                                                                         | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                            | Penanggung Jawab |
|-----------|------------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4       | 5               | 6                 | 7                                                         | 8                                                                  | 9                                                                             | 10                                                                                   | 11                                                                                                                                                    | 12                                                                                                                                                | 13               |
|           |            |                                 |         |                 |                   | 15 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah                | Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah                   | 33 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   |                                                           |                                                                    |                                                                               | 34 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                                              |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   |                                                           |                                                                    |                                                                               | 35 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   |                                                           |                                                                    |                                                                               | 36 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                             | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   |                                                           |                                                                    |                                                                               | 37 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   | 16 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terkelolanya barang milik daerah dengan baik                       | Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 38 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                         | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   |                                                           |                                                                    |                                                                               | 39 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   | 17 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah                | 40 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |                  |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program | Kinerja Program | Indikator Program | Kegiatan | Kinerja Kegiatan                   | Indikator Kegiatan                              | Sub Kegiatan                                            | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------|------------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1         | 2          | 3                               | 4       | 5               | 6                 | 7        | 8                                  | 9                                               | 10                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|           |            |                                 |         |                 |                   | 18       | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah | Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah | 41 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>42 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>43 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>44 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>45 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>46 Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>47 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>48 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>49 Penyediaan Bahan/Material<br>50 Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>51 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga<br>Tersedianya Bahan Logistik Kantor<br>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan<br>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>Tersedianya Bahan/Material<br>Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program | Kinerja Program | Indikator Program | Kegiatan | Kinerja Kegiatan                                                 | Indikator Kegiatan                                                 | Sub Kegiatan                                                                 | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------|------------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1         | 2          | 3                               | 4       | 5               | 6                 | 7        | 8                                                                | 9                                                                  | 10                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |            |                                 |         |                 |                   | 19       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 52 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>53 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>54 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>55 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>56 Pengadaan Mebel<br>57 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>58 Pengadaan Aset Tak Berwujud<br>59 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>60 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>61 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>Tersedianya Mebel<br>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Tersedianya Aset Tak Berwujud<br>Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |

| Tujuan PD | Sasaran PD                                                         | Indikator Tujuan dan Sasaran PD                                      | Program                                      | Kinerja Program                                   | Indikator Program                                                                                                                    | Kegiatan                                                                                   | Kinerja Kegiatan                                                                    | Indikator Kegiatan                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                   | Penanggung Jawab   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | 2                                                                  | 3                                                                    | 4                                            | 5                                                 | 6                                                                                                                                    | 7                                                                                          | 8                                                                                   | 9                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                                       | 13                 |
|           | 5                                                                  | 3.                                                                   | 13                                           |                                                   |                                                                                                                                      | 21                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                       | 62                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                    |
|           | Terkendalinya ketersediaan stok sembako dan barang penting lainnya | Tingkat Inflasi                                                      | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                          | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                   |                    |
|           |                                                                    | Persentase tingkat kecukupan stok sembako dan barang penting lainnya |                                              |                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                       | 63                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                    |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                            | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                    |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                       | 64                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                    |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                   |                    |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                       | 65                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                    |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                         | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                       |                    |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                       | 66                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                    |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                     | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                                                                                                |                    |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      | 22                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                       | 67                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                    |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Perdagangan                          | Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Bidang Perdagangan |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      | 23                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                       | 68                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                    |
|           |                                                                    |                                                                      |                                              |                                                   |                                                                                                                                      | Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                             | Terlaksananya Penerbitan TDG                                                        | Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang Yang dimonitoring                                               | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                        | Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                       |                    |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program | Kinerja Program | Indikator Program | Kegiatan                                                                                                         | Kinerja Kegiatan              | Indikator Kegiatan                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Penanggung Jawab |
|-----------|------------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4       | 5               | 6                 | 7                                                                                                                | 8                             | 9                                                        | 10                                                                                                                                          | 11                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                 | 13               |
|           |            |                                 |         |                 |                   | 24 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri         | Terlaksananya Penerbitan STPW | Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu | 69 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik               | Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik                | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik                                     |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   | 25 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri | Terlaksananya Penerbitan STPW | Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu  | 70 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri                           | Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri              | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri                       |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   |                                                                                                                  |                               |                                                          | 71 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri | Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   |                                                                                                                  |                               |                                                          | 72 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri                                      | Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri                         | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri                                  |                  |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program | Kinerja Program | Indikator Program | Kegiatan                                                                                                                                                    | Kinerja Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kegiatan                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab |
|-----------|------------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4       | 5               | 6                 | 7                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                        | 10                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                      | 13               |
|           |            |                                 |         |                 |                   | 26 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat                          | Terlaksananya Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C                                                                                      | Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C                                                                                                      | 73 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C                                                    | Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   | 27 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota | 74 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya                                                                                                   | Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya                                                                                                                                            |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | 75 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2                                                  | Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2                                                                                    |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | 76 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)                          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)                          |                  |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program                                                                | Kinerja Program                                             | Indikator Program                                 | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kegiatan                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab   |
|-----------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4                                                                      | 5                                                           | 6                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                 |
|           |            |                                 | 14 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 1. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu | 28 Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)<br>29 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal<br><br>Terlaksananya Kegiatan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu<br><br>Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. | 77 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA<br><br>78 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat<br><br>79 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat<br><br>80 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal<br><br>Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat<br><br>Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat<br><br>Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal<br><br>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat<br><br>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat<br><br>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Bidang Perdagangan |
|           |            |                                 |                                                                        |                                                             |                                                   | 30 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                                                                                                                      | Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar                                                                 | Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar        | 81 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program | Kinerja Program | Indikator Program                     | Kegiatan                                                                      | Kinerja Kegiatan                                        | Indikator Kegiatan                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Penanggung Jawab |
|-----------|------------|---------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4       | 5               | 6                                     | 7                                                                             | 8                                                       | 9                                                | 10                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                        | 13               |
|           |            |                                 |         |                 | 2. Persentase kinerja realisasi pupuk | 31 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi | 82 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                                       |                                                                               |                                                         |                                                  | 83 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                            | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                                       |                                                                               |                                                         |                                                  | 84 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                        | Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                                         | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                                    |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                                       |                                                                               |                                                         |                                                  | 85 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        | Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                                       |                                                                               |                                                         |                                                  | 86 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                        | Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                           | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                           |                  |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program                                                 | Kinerja Program                                                                           | Indikator Program                                                                                    | Kegiatan                                                                                                                                               | Kinerja Kegiatan                                                                                | Indikator Kegiatan                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                          | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                         | Penanggung Jawab   |
|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                                    | 7                                                                                                                                                      | 8                                                                                               | 9                                                                                          | 10                                                                                                    | 11                                                                                                                | 12                                                                                                                             | 13                 |
|           |            |                                 | 15 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                          | Meningkatnya pelaku usaha ekspor                                                          | Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina                                                           | 32 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang                                 | 87 Pameran Dagang Nasional                                                                            | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                     | Bidang Perdagangan |
|           |            |                                 |                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | 88 Pameran Dagang Lokal                                                                               | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal                                  | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal                                                               |                    |
|           |            |                                 |                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | 89 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan                                                            | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                 |                    |
|           |            |                                 |                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | 90 Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                    | Meningkatnya Citra Produk Ekspor                                                                                  | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi                                                       |                    |
|           |            |                                 | 16 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN      | alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) bertanda terasah yang berlaku | 33 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                | Alat- alat UTTP sesuai ketentuan                                                                | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang             | 91 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                               | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                 | Bidang Perdagangan |
|           |            |                                 |                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | 92 Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal                                                             | Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                      |                    |
|           |            |                                 |                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | 93 Penyidikan Metrologi Legal                                                                         | Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal                                                                          | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal                                                                                   |                    |
|           |            |                                 | 17 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                                 | Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri       | 34 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                       | Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                 | Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 94 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Bidang Perdagangan |

| Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan dan Sasaran PD | Program | Kinerja Program | Indikator Program | Kegiatan | Kinerja Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan                                                                          | Kinerja Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                           | Penanggung Jawab |
|-----------|------------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1         | 2          | 3                               | 4       | 5               | 6                 | 7        | 8                | 9                  | 10                                                                                    | 11                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                               | 13               |
|           |            |                                 |         |                 |                   |          |                  |                    | 95 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota       | Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                          |                  |
|           |            |                                 |         |                 |                   |          |                  |                    | 96 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi |                  |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan RPD Kota Pontianak. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka strategi strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah:

#### **1. Sasaran 1: Meningkatkan Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan.**

Strategi: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat).
- b. Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat)

#### **2. Sasaran 2: Meningkatkan pelaku industri kecil**

Strategi:

- a. Perencanaan dan Pembangunan Industri.
- b. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan sistem informasi Industri Nasional.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah.
- c. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **3. Sasaran 3 : Meningkatkan Koperasi yang Aktif**

Strategi:

- a. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- c. Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit simpan Pinjam Koperasi
- d. Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - c. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - d. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - e. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
  - f. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 4. Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro**

Strategi:

- a. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro
- b. Pengembangan Usaha Mikro

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
  - b. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- 5. Sasaran 5 : Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya.**

Strategi:

- a. Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- c. Pengembangan Ekspor
- d. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- e. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
- c. Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
- d. Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri.
- e. Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat.
- f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- g. Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- h. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- i. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
- j. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- k. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- l. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- m. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 s/d 2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan kota Pontianak dijabarkan pada tabel V.1.

Tabel V.1

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan                                                   | Sasaran                                          |                                                               | Strategi                                                                                                 |                                           | Arah Kebijakan |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                |                                                               | 3                                                                                                        |                                           | 4              |                                                                                                                                                                      |
| Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri | 1                                                | Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan | 1                                                                                                        | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 1              | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat )                                                                                            |
|                                                          |                                                  |                                                               |                                                                                                          |                                           | 2              | Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat)                                                                                                   |
|                                                          | 2                                                | Meningkatnya pelaku industri kecil                            | 2                                                                                                        | Perencanaan dan Pembangunan Industri      | 3              | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                  |
|                                                          |                                                  |                                                               |                                                                                                          |                                           | 3              | Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                      |
|                                                          |                                                  |                                                               |                                                                                                          |                                           | 4              | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah                                                                                                          |
|                                                          | 3                                                | Meningkatnya Koperasi yang Aktif                              | 5                                                                                                        | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam       | 4              | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      |
|                                                          |                                                  |                                                               |                                                                                                          |                                           | 6              | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                            |
|                                                          |                                                  |                                                               |                                                                                                          |                                           | 7              | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|                                                          |                                                  |                                                               |                                                                                                          |                                           | 8              | Pemeriksaan dan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                                                                                                  |
|                                                          |                                                  |                                                               |                                                                                                          |                                           | 9              | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit simpan Pinjam Koperasi                                                                                              |
| 8                                                        | Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 10                                                            | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota |                                           |                |                                                                                                                                                                      |

| Tujuan | Sasaran | Strategi                                                           | Arah Kebijakan                                     |                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                  | 4                                                  |                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|        |         | 9                                                                  | Peningkatan PEMBERDAYAAN dan Perlindungan Koperasi | 11                                              | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|        | 4       | Meningkatnya PEMBERDAYAAN Usaha Mikro                              | 10                                                 | Peningkatan PEMBERDAYAAN Usaha Mikro            | 12                                                                                                                                                       | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan                 |
|        |         |                                                                    | 11                                                 | Pengembangan Usaha Mikro                        | 13                                                                                                                                                       | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                                            |
|        | 5       | Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya | 12                                                 | Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 14                                                                                                                                                       | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
|        |         |                                                                    |                                                    | 15                                              | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |
|        |         |                                                                    |                                                    | 16                                              | Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri                                         |                                                                                                                                                                                  |
|        |         |                                                                    |                                                    | 17                                              | Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri                                 |                                                                                                                                                                                  |
|        |         |                                                                    |                                                    | 18                                              | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat               |                                                                                                                                                                                  |
|        |         |                                                                    |                                                    | 19                                              | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                                                                                  |
|        |         |                                                                    |                                                    | 20                                              | Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)           |                                                                                                                                                                                  |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan                                              |                                                                                                                       |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2       | 3        | 4                                                           |                                                                                                                       |
|        |         | 13       | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |                                                                                                                       |
|        |         |          | 21                                                          | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      |
|        |         |          | 23                                                          | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                |
|        |         |          | 24                                                          | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |
|        |         | 14       | Pengembangan Ekspor                                         |                                                                                                                       |
|        |         |          | 25                                                          | Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|        |         | 15       | Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen          |                                                                                                                       |
|        |         |          | 26                                                          | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                   |
|        |         | 16       | Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri    |                                                                                                                       |
|        |         |          | 25                                                          | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                         |

## 5.2. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak adalah bersumber dari Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

Adapun upaya dalam mengoptimalisasi PAD ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menyusun Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 98 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar. Pembayaran retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dengan dua cara :

1. Dibayar secara tunai (offline) untuk disetorkan ke Kas Daerah Kota Pontianak, melalui:
  - a) Juru pungut retribusi yang ditugaskan oleh dinas;
  - b) Bendahara penerimaan pada dinas; dan/atau
  - c) Teller pada bank yang ditunjuk.
2. Dibayar secara non tunai (online) langsung ke Kas Daerah Kota Pontianak, melalui:
  - a) ATM;
  - b) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS);
  - c) Internet banking;

- d) Mobile banking;
- e) Alat pembayaran menggunakan kartu lainnya, cek, bilyet, giro; dan/atau
- f) Dompet elektronik (e-wallet).

Pembayaran melalui cara diatas adalah menggunakan Virtual Account (VA) bekerjasama dengan Bank Kalbar. DKUMP menginput tagihan dan piutang ke dalam dokumen tagihan. Kemudian tagihan tersebut dikirim ke Bank Kalbar atas persetujuan Kepala Dinas. Setelah itu dari Bank Kalbar akan diinput ke sistem CMS dan nomor VA-nya siap disampaikan kepada pedagang di pasar rakyat binaan DKUMP Kota Pontianak dalam bentuk surat tagihan yang berisi nomor VA dan jumlah tagihannya.

Dampak yang diharapkan dalam penggunaan VA untuk pembayaran retribusi ini antara lain:

1. Menghindari kebocoran dalam hal penerimaan retribusi
2. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang pasar
3. Sebagai antisipasi dalam permasalahan kekurangan SDM pegawai penarik retribusi
4. Memudahkan untuk mengetahui atau mengidentifikasi pedagang yang sudah atau belum membayar retribusi.

Tabel V.II Rencana Pendapatan Dan Penerimaan

Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026

| No | Uraian Pendapatan                                                     | Tahun 2024    | Tahun 2025    | Tahun 2026    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | <i>Retribusi Pasar</i>                                                | 3.980.800.000 | 4.180.800.000 | 4.380.800.000 |
| 2. | <i>Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Penyewaan bangunan Pasar)</i> | 2.519.200.000 | 2.819.200.000 | 3.119.200.000 |
|    | Total                                                                 | 6.500.000.000 | 7.000.000.000 | 7.500.000.000 |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 – 2026 meliputi:

#### 1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Hasil (Outcome) : **Laju PDRB Sektor Perdagangan**

Indikator kinerja:

- Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatan

Kegiatan :

##### a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

##### b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

#### 2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Hasil (Outcome) : **Laju PDRB Sektor Industri**

Indikator kinerja:

- Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP.

Kegiatan:

##### a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT.

3. *PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA*

Hasil (Outcome) : **Laju PDRB Sektor Industri**

Indikator kinerja: Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait.

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT.

4. *PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL*

Hasil (Outcome) : **Laju PDRB Sektor Industri**

Indikator kinerja:

- Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri

Kegiatan:

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Persentase industri terdata dalam SIINas.

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT

5. *PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM*

Hasil (Outcome) :

**1. Laju PDRB Sektor Perdagangan**

**2. Laju PDRB Sektor Industri**

Indikator kinerja:

- Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah izin yang diterbitkan.

Kelompok sasaran: Koperasi

- b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): jumlah izin yang diterbitkan.

Kelompok sasaran: Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, Menengah.

6. *PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI*

Hasil (Outcome) :

1. **Laju PDRB Sektor Perdagangan**
2. **Laju PDRB Sektor Industri**

Indikator kinerja:

- Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan

Kegiatan:

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Koperasi yang di periksa dan awasi.

Kelompok sasaran: Koperasi.

7. *PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI*

Hasil (Outcome) :

1. **Laju PDRB Sektor Perdagangan**
2. **Laju PDRB Sektor Industri**

Indikator kinerja:

- Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT

Kegiatan:

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah KSP/USP yang bernilai SEHAT a.

Kelompok sasaran: Koperasi

8. *PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN*

Hasil (Outcome):

1. **Laju PDRB Sektor Perdagangan**
2. **Laju PDRB Sektor Industri**

Indikator kinerja:

- Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian

Kegiatan:

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah anggota Koperasi yang dilatih.

Kelompok sasaran: Koperasi.

9. *PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI*

Hasil (*Outcome*):

1. **Laju PDRB Sektor Perdagangan**
2. **Laju PDRB Sektor Industri**

Indikator kinerja:

- Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.

Kelompok sasaran: Koperasi.

10. *PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)*

Hasil (*Outcome*):

1. **Laju PDRB Sektor Perdagangan**
2. **Laju PDRB Sektor Industri**

Indikator kinerja:

- Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah usaha mikro yang diberdayakan.

Kelompok sasaran: Usaha Mikro

11. *PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM*

Hasil (*Outcome*):

1. **Laju PDRB Sektor Perdagangan**
2. **Laju PDRB Sektor Industri**

Indikator kinerja:

- Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya

Kegiatan:

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro.

Kelompok sasaran: Usaha Mikro

## 12. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Hasil (Outcome) : **Tingkat Inflasi**

Indikator kinerja:

- Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Indikator Keluaran (Output): Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Kelompok sasaran: pelaku usaha

- b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang Yang dimonitoring

Kelompok sasaran: pelaku usaha

- c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu

Kelompok sasaran: pelaku usaha

- d. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri

Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu

Kelompok sasaran: pelaku usaha

- e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu

- f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C

Kelompok sasaran: pelaku usaha

- g. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

Indikator Keluaran (Output): Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu

Kelompok sasaran: pelaku usaha

### *13. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING*

Hasil (Outcome) : **Tingkat Inflasi**

Indikator kinerja:

- Persentase Koefisien variasi harga antar waktu
- Persentase kinerja realisasi pupuk

Kegiatan:

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting..

Kelompok sasaran: pelaku usaha.

- b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar.

Kelompok sasaran: pelaku usaha

- c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi

Kelompok sasaran: pelaku usaha.

### *14. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR*

Hasil (Outcome) : **Tingkat Inflasi**

Indikator kinerja:

- Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina.

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang.

Kelompok sasaran: pelaku usaha

15. *PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*

Hasil (*Outcome*) : **Tingkat Inflasi**

Indikator kinerja:

- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) bertanda terasah yang berlaku.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang

Kelompok sasaran: pelaku usaha

16. *PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI*

Hasil (*Outcome*) : **Tingkat Inflasi**

Indikator kinerja:

- Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Keluaran ( Output): Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kelompok sasaran : pelaku usaha

17. *PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*

Hasil (*Outcome*):

**1. Laju PDRB Sektor Perdagangan**

**2. Laju PDRB Sektor Industri**

**3. Tingkat Inflasi**

Indikator kinerja:

- Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran: OPD.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output): Persentase pemenuhan administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Kelompok sasaran : OPD

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah  
Kelompok sasaran: OPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator Keluaran: Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah.  
Kelompok sasaran: OPD
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator Keluaran: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah  
Kelompok sasaran: OPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Keluaran: Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  
Kelompok sasaran: OPD
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Keluaran: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah  
Kelompok sasaran: OPD
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator Keluaran: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah  
Kelompok sasaran: OPD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 6.1:

Tabel VI.1  
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

| Tujuan                                                        | Sasaran           | Kode | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan         | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |           |                |           |                |                                                                    |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                                               |                   |      |                                                                                           |                                                                                                  |                                                 | 2024                                          |                | 2025      |                | 2026      |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |                |                                              |                |
|                                                               |                   |      |                                                                                           |                                                                                                  |                                                 | Target                                        | Rp             | Target    | Rp             | Target    | Rp             | Target                                                             | Rp             |                                              |                |
| 1                                                             | 2                 |      |                                                                                           |                                                                                                  | 6                                               | 7                                             | 8              | 9         | 10             | 11        | 12             | 13                                                                 | 14             | 15                                           | 16             |
| Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri      |                   |      |                                                                                           | 1. Laju PDRB sektor Perdagangan                                                                  | 4,97%                                           | 4,98%                                         | 15.858.345.690 | 4,99%     | 16.593.068.360 | 5,00%     | 17.177.155.290 | 5,00%                                                              | 49.628.569.340 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|                                                               |                   |      |                                                                                           | 2. Laju PDRB sektor Industri                                                                     | 4,74%                                           | 4,75%                                         |                | 4,77%     |                | 4,80%     |                |                                                                    |                |                                              |                |
| Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan |                   |      |                                                                                           | Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan                                | 60,00%                                          | 75,00%                                        | 746.673.600    | 80,00%    | 1.143.873.600  | 85,00%    | 1.207.273.600  | 85,00%                                                             | 3.097.820.800  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|                                                               | 03.30.03          |      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                         | Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan                                  | 50,00%                                          | 100,00%                                       | 746.673.600    | 100,00%   | 1.143.873.600  | 100,00%   | 1.207.273.600  | 100,00%                                                            | 3.097.820.800  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|                                                               | 3.30.03.2.01      |      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                 | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola                                  | 14 Unit                                         | 14 Unit                                       | 674.973.600    | 15 Unit   | 1.038.973.600  | 18 Unit   | 1.059.973.600  | 18 Unit                                                            | 2.773.920.800  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|                                                               | 3.30.03.2.01.0001 |      | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan                                                             | 3 Unit                                          | 2 Unit                                        | 640.473.600    | 3 Unit    | 988.973.600    | 3 Unit    | 989.473.600    | 3 Unit                                                             | 2.618.920.800  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|                                                               | 3.30.03.2.01.0002 |      | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                      | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                      | 14 Unit                                         | 14 Unit                                       | 34.500.000     | 15 Unit   | 50.000.000     | 18 Unit   | 70.500.000     | 18 Unit                                                            | 155.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|                                                               | 3.30.03.2.02      |      | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | 14 Unit                                         | 14 Unit                                       | 71.700.000     | 15 Unit   | 104.900.000    | 18 Unit   | 147.300.000    | 18 Unit                                                            | 323.900.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|                                                               | 3.30.03.2.02.0001 |      | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 35.850.000     | 1 Dokumen | 52.450.000     | 1 Dokumen | 73.650.000     | 1 Dokumen                                                          | 161.950.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|                                                               | 3.30.03.2.02.0002 |      | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 35.850.000     | 1 Dokumen | 52.450.000     | 1 Dokumen | 73.650.000     | 1 Dokumen                                                          | 161.950.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran                            | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                                    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |           |               |           |               |                                                                    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |                |
|--------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------|
|        |                                    |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                 | 2024                                          |               | 2025      |               | 2026      |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |                                              |        |                |
|        |                                    |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                 | Target                                        | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target                                                             |                                              |        | Rp             |
|        | Meningkatnya pelaku industri kecil |                   |                                                                                                                                                           | Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil                                                                                                         | 2.36%                                           | 2.50%                                         | 1.082.500.000 | 2.60%     | 1.115.000.000 | 2.80%     | 1.260.000.000 | 2,80%                                                              | 3.457.500.000                                | DKUMP  | Kota Pontianak |
|        |                                    | 03.31.02          | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                              | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK                   | 100%                                            | 100%                                          | 1.076.500.000 | 100%      | 1.085.000.000 | 100%      | 1.200.000.000 | 100%                                                               | 3.361.500.000                                | DKUMP  | Kota Pontianak |
|        |                                    | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                             | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 1.076.500.000 | 1 Dokumen | 1.085.000.000 | 1 Dokumen | 1.200.000.000 | 1 Dokumen                                                          | 3.361.500.000                                | DKUMP  | Kota Pontianak |
|        |                                    | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                      | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 1.000.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 1 Dokumen                                                          | 3.000.000.000                                | DKUMP  | Kota Pontianak |
|        |                                    | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                             | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 35.000.000    | 1 Dokumen | 40.000.000    | 1 Dokumen | 85.000.000    | 1 Dokumen                                                          | 160.000.000                                  | DKUMP  | Kota Pontianak |
|        |                                    | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                    | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 9.500.000     | 1 Dokumen | 10.000.000    | 1 Dokumen | 65.000.000    | 1 Dokumen                                                          | 84.500.000                                   | DKUMP  | Kota Pontianak |
|        |                                    | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                             | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 32.000.000    | 1 Dokumen | 35.000.000    | 1 Dokumen | 40.000.000    | 1 Dokumen                                                          | 107.000.000                                  | DKUMP  | Kota Pontianak |
|        |                                    | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                                | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                            | -                                               | -                                             | -             | -         | -             | 1 Dokumen | 10.000.000    | 1 Dokumen                                                          | 10.000.000                                   | DKUMP  | Kota Pontianak |
|        |                                    | 03.31.03          | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA                                                                                                   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait | 78%                                             | 80%                                           | 1.500.000     | 80%       | 5.000.000     | 85%       | 20.000.000    | 85%                                                                | 10.000.000                                   | DKUMP  | Kota Pontianak |
|        |                                    | 3.31.03.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) | jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri                                                                                                        | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 1.500.000     | 1 Dokumen | 5.000.000     | 1 Dokumen | 10.000.000    | 1 Dokumen                                                          | 10.000.000                                   | DKUMP  | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |           |            |           |            |                                                                    |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | 2024                                          |           | 2025      |            | 2026      |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |            |                                              |                |
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Target                                        | Rp        | Target    | Rp         | Target    | Rp         | Target                                                             | Rp         |                                              |                |
|        |         |                   | <b>Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                               |           |           |            |           |            |                                                                    |            |                                              |                |
|        |         | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                               | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 1.500.000 | 1 Dokumen | 5.000.000  | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen                                                          | 16.500.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -         | 1 Dokumen | -          | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen                                                          | 10.000.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 03.31.04          | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                | Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90%                                             | 90%                                           | 6.000.000 | 90%       | 30.000.000 | 90%       | 50.000.000 | 90%                                                                | 86.000.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.31.04.2.01      | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                | Persentase industri terdata dalam SIINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42%                                             | 50%                                           | 6.000.000 | 55%       | 30.000.000 | 60%       | 50.000.000 | 60%                                                                | 86.000.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 6.000.000 | 1 Dokumen | 15.000.000 | 1 Dokumen | 25.000.000 | 1 Dokumen                                                          | 46.000.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran                          | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                                                            | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |              |             |              |             |                                                                    |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                 | 2024                                          |             | 2025         |             | 2026         |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |               |                                              |                |
|        |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                 | Target                                        | Rp          | Target       | Rp          | Target       | Rp          | Target                                                             | Rp            |                                              |                |
|        |                                  |                   | Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                               |             |              |             |              |             |                                                                    |               |                                              |                |
|        |                                  | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                                                    | -                                               | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen    | 10.000.000  | 1 Dokumen    | 15.000.000  | 1 Dokumen                                                          | 25.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                  | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                  | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen    | 5.000.000   | 1 Dokumen    | 10.000.000  | 1 Dokumen                                                          | 15.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        | Meningkatnya Koperasi yang Aktif |                   |                                                                                                                                                                                                        | persentase koperasi aktif                                                                                                                                                           | 95%                                             | 97%                                           | 438.670.000 | 97.50%       | 479.670.000 | 98%          | 523.170.000 | 98%                                                                | 1.441.510.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                  | 02.17.02          | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                                                                                                                                             | Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam                                                                                                                                      | 100,00%                                         | 100,00%                                       | -           | 100,00%      | -           | 100,00%      | 15.000.000  | 100,00%                                                            | 15.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                  | 2.17.02.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah izin yang diterbitkan                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen    | -           | 1 Dokumen    | 15.000.000  | 3 Dokumen                                                          | 15.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                  | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit Usaha                                    | 1 Unit Usaha                                  | -           | 1 Unit Usaha | -           | 1 Unit Usaha | 15.000.000  | 1 Unit Usaha                                                       | 15.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                  | 2.17.02.2.02      | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | jumlah izin yang diterbitkan                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen    | -           | 1 Dokumen    | -           | 1 Dokumen                                                          | -             | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |                |            |                |            |                                                                    |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                                 | 2024                                          |            | 2025           |            | 2026           |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |             |                                              |                |
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                                 | Target                                        | Rp         | Target         | Rp         | Target         | Rp         | Target                                                             | Rp          |                                              |                |
|        |         | 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit Usaha                                    | 1 Unit Usaha                                  | -          | 1 Unit Usaha   | -          | 1 Unit Usaha   | -          | 1 Unit Usaha                                                       | -           | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 02.17.03          | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                                                                                   | Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan                                                                                                  | 29%                                             | 35%                                           | 21.500.000 | 40%            | 33.500.000 | 45%            | 45.500.000 | 45%                                                                | 100.500.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.03.2.01      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                     | Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi                                                                                                        | 485 Unit Usaha                                  | 485 Unit Usaha                                | 21.500.000 | 485 Unit Usaha | 33.500.000 | 485 Unit Usaha | 45.500.000 | 485 Unit Usaha                                                     | 100.500.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                   | 512 Unit Usaha                                  | 512 Unit Usaha                                | 21.500.000 | 512 Unit Usaha | 33.500.000 | 512 Unit Usaha | 45.500.000 | 512 Unit Usaha                                                     | 100.500.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 02.17.04          | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>                                                                                                                                  | Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT                                                                                                            | 4,00%                                           | 5,00%                                         | 3.000.000  | 6,00%          | 30.500.000 | 6,00%          | 42.500.000 | 6,00%                                                              | 76.000.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.04.2.01      | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah KSP/USP yang bernilai SEHAT                                                                                                                | 7 Unit Usaha                                    | 8 Unit Usaha                                  | 3.000.000  | 10 Unit Usaha  | 30.500.000 | 10 Unit Usaha  | 42.500.000 | 10 Unit Usaha                                                      | 76.000.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                           | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan                                                                               | 100 Unit Usaha                                  | 125 Unit Usaha                                | 3.000.000  | 130 Unit Usaha | 5.500.000  | 150 Unit Usaha | 7.500.000  | 150 Unit Usaha                                                     | 16.000.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                                                   | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan                                                                                                | 10 Unit Usaha                                   | 20 Unit Usaha                                 | -          | 25 Unit Usaha  | 25.000.000 | 30 Unit Usaha  | 35.000.000 | 30 Unit Usaha                                                      | 60.000.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran                               | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                                                      | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |                |                |                                                                    |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |                                       |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                 | 2024                                          |                | 2025           |                | 2026           |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |                |                                              |                |
|        |                                       |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                 | Target                                        | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target                                                             | Rp             |                                              |                |
|        |                                       | 02.17.05          | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                     | Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian                                                                                               | 32%                                             | 35%                                           | 410.170.000    | 40%            | 410.170.000    | 40%            | 410.170.000    | 40%                                                                | 1.230.510.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                       | 2.17.05.2.01      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah anggota Koperasi yang dilatih                                                                                                                                          | 160 Orang                                       | 180 Orang                                     | 410.170.000    | 180 Orang      | 410.170.000    | 180 Orang      | 410.170.000    | 180 Orang                                                          | 1.230.510.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                       | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                            | 160 Orang                                       | 180 Orang                                     | 410.170.000    | 180 Orang      | 410.170.000    | 180 Orang      | 410.170.000    | 180 Orang                                                          | 1.230.510.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                       | 02.17.06          | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                   | Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi                                                                                             | 94%                                             | 95%                                           | 4.000.000      | 95%            | 5.500.000      | 96%            | 10.000.000     | 96%                                                                | 19.500.000     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                       | 2.17.06.2.01      | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi                                                                                                                     | 1 Kegiatan                                      | 1 Kegiatan                                    | 4.000.000      | 1 Kegiatan     | 5.500.000      | 1 Kegiatan     | 10.000.000     | 1 Kegiatan                                                         | 19.500.000     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                       | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha       | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 100 Unit Usaha                                  | 120 Unit Usaha                                | 4.000.000      | 120 Unit Usaha | 5.500.000      | 150 Unit Usaha | 10.000.000     | 150 Unit Usaha                                                     | 19.500.000     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        | Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro |                   |                                                                                                                                                                  | Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru                                                                                                                                       | 4.3%                                            | 5%                                            | 13.590.502.090 | 5.50%          | 13.854.524.760 | 6%             | 14.186.711.690 | 6%                                                                 | 41.631.738.540 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                       | 02.17.07          | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan                                                                                                                                      | 2.65%                                           | 2.85%                                         | 13.000.000     | 2.95%          | 24.000.000     | 3%             | 50.000.000     | 3%                                                                 | 87.000.000     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |                                       | 2.17.07.2.01      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah usaha mikro yang diberdayakan                                                                                                                                          | 32 Unit Usaha                                   | 50 Unit Usaha                                 | 13.000.000     | 50 Unit Usaha  | 24.000.000     | 50 Unit Usaha  | 50.000.000     | 50 Unit Usaha                                                      | 87.000.000     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                   |                       |                   |                       |                                                                    |                       | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |         |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                 | 2024                                          |                       | 2025              |                       | 2026              |                       | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |                       |                                              |                |
|        |         |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                 | Target                                        | Rp                    | Target            | Rp                    | Target            | Rp                    | Target                                                             | Rp                    |                                              |                |
|        |         | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                            | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                             | 80 Unit Usaha                                   | 100 Unit Usaha                                | -                     | 100 Unit Usaha    | -                     | 120 Unit Usaha    | -                     | 120 Unit Usaha                                                     | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                            | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                         | 1000 Unit Usaha                                 | 1100 Unit Usaha                               | -                     | 1200 Unit Usaha   | -                     | 1300 Unit Usaha   | -                     | 1300 Unit Usaha                                                    | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                         | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                       | 80 Unit Usaha                                   | 100 Unit Usaha                                | 13.000.000            | 100 Unit Usaha    | 24.000.000            | 120 Unit Usaha    | 50.000.000            | 120 Unit Usaha                                                     | 87.000.000            | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                           | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 80 Orang                                        | 100 Orang                                     | -                     | 100 Orang         | -                     | 120 Orang         | -                     | 120 Orang                                                          | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                          | 80 Orang                                        | 100 Orang                                     | -                     | 100 Orang         | -                     | 120 Orang         | -                     | 120 Orang                                                          | -                     | DKUMP                                        |                |
|        |         | 02.17.08          | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                      | <b>Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya</b>                                                                 | <b>0,26%</b>                                    | <b>0,34%</b>                                  | <b>1.147.800.000</b>  | <b>0,37%</b>      | <b>1.315.800.000</b>  | <b>0,42%</b>      | <b>1.419.800.000</b>  | <b>0,42%</b>                                                       | <b>3.883.400.000</b>  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.08.2.01      | <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>                                          | <b>Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro</b>                                                     | <b>1 Kegiatan</b>                               | <b>1 Kegiatan</b>                             | <b>1.147.800.000</b>  | <b>1 Kegiatan</b> | <b>1.315.800.000</b>  | <b>1 Kegiatan</b> | <b>1.419.800.000</b>  | <b>1 Kegiatan</b>                                                  | <b>3.883.400.000</b>  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                       | 80 Unit Usaha                                   | 100 Unit Usaha                                | 1.147.800.000         | 100 Unit Usaha    | 1.315.800.000         | 120 Unit Usaha    | 1.419.800.000         | 120 Unit Usaha                                                     | 3.883.400.000         | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                    | <b>Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan</b>                                                           | <b>95%</b>                                      | <b>95%</b>                                    | <b>12.429.702.090</b> | <b>95%</b>        | <b>12.514.724.760</b> | <b>95%</b>        | <b>12.716.911.690</b> | <b>95%</b>                                                         | <b>37.661.338.540</b> | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.01      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                               | <b>Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>                               | <b>100%</b>                                     | <b>100%</b>                                   | <b>6.500.000</b>      | <b>100%</b>       | <b>7.500.000</b>      | <b>100%</b>       | <b>12.000.000</b>     | <b>100%</b>                                                        | <b>26.000.000</b>     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 | 5 Dokumen                                       | 5 Dokumen                                     | 5.500.000             | 5 Dokumen         | 6.000.000             | 5 Dokumen         | 10.000.000            | 5 Dokumen                                                          | 21.500.000            | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -                     | 1 Dokumen         | -                     | 1 Dokumen         | -                     | 1 Dokumen                                                          | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode                | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                                               | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |                |                      |                |                      |                                                                    |                       | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |         |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                 | 2024                                          |                      | 2025           |                      | 2026           |                      | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |                       |                                              |                |
|        |         |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                 | Target                                        | Rp                   | Target         | Rp                   | Target         | Rp                   | Target                                                             | Rp                    |                                              |                |
|        |         | X.XX.01.2.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -                    | 1 Dokumen      | -                    | 1 Dokumen      | -                    | 1 Dokumen                                                          | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                     | -                    | 1 Laporan      | -                    | 1 Laporan      | -                    | 1 Laporan                                                          | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan                                       | 3 Laporan                                     | 1.000.000            | 3 Laporan      | 1.500.000            | 3 Laporan      | 2.000.000            | 3 Laporan                                                          | 4.500.000             | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | <b>X.XX.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                     | <b>100%</b>                                     | <b>100%</b>                                   | <b>9.000.829.000</b> | <b>100%</b>    | <b>8.852.261.000</b> | <b>100%</b>    | <b>8.764.947.930</b> | <b>100%</b>                                                        | <b>26.618.037.930</b> | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 60 Orang / Bulan                                | 65 Orang/Bulan                                | 8.667.859.000        | 65 Orang/Bulan | 8.519.291.000        | 65 Orang/Bulan | 8.421.723.000        | 65 Orang/Bulan                                                     | 25.608.873.000        | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen                                       | 2 Dokumen                                     | 332.970.000          | 2 Dokumen      | 332.970.000          | 2 Dokumen      | 343.224.930          | 2 Dokumen                                                          | 1.009.164.930         | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                     | -                    | 1 Laporan      | -                    | 1 Laporan      | -                    | 1 Laporan                                                          | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 2 Dokumen                                       | 2 Dokumen                                     | -                    | 2 Dokumen      | -                    | 2 Dokumen      | -                    | 2 Dokumen                                                          | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 4 Laporan                                       | 4 Laporan                                     | -                    | 4 Laporan      | -                    | 4 Laporan      | -                    | 4 Laporan                                                          | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | <b>X.XX.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>                                                                                   | <b>100%</b>                                     | <b>100%</b>                                   | <b>-</b>             | <b>100%</b>    | <b>-</b>             | <b>100%</b>    | <b>-</b>             | <b>100%</b>                                                        | <b>-</b>              | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -                    | 1 Dokumen      | -                    | 1 Dokumen      | -                    | 1 Dokumen                                                          | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                     | -                    | 1 Laporan      | -                    | 1 Laporan      | -                    | 1 Laporan                                                          | -                     | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |             |            |             |                                                                    |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |         |                   |                                                                        |                                                                                          |                                                 | 2024                                          |             | 2025       |             | 2026       |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |             |                                              |                |
|        |         |                   |                                                                        |                                                                                          |                                                 | Target                                        | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target                                                             | Rp          |                                              |                |
|        |         | X.XX.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah                           | 100%                                            | 100%                                          | 70.610.000  | 100%       | 70.610.000  | 100%       | 80.610.000  | 100%                                                               | 221.830.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                   | 2 Paket                                         | 2 paket                                       | 70.610.000  | 2 paket    | 70.610.000  | 2 paket    | 70.610.000  | 2 paket                                                            | 211.830.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan      | 2 Orang                                         | 5 Orang                                       | -           | 5 Orang    | -           | 5 Orang    | 5.000.000   | 5 Orang                                                            | 5.000.000   | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 5 Orang                                         | 5 Orang                                       | -           | 5 Orang    | -           | 5 Orang    | 5.000.000   | 5 Orang                                                            | 5.000.000   | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah                                  | 100%                                            | 100%                                          | 298.500.000 | 100%       | 321.500.000 | 100%       | 376.500.000 | 100%                                                               | 996.500.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan       | 1 Paket                                         | 1 Paket                                       | 10.000.000  | 1 Paket    | 12.000.000  | 1 Paket    | 15.000.000  | 1 Paket                                                            | 37.000.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           | 4 Paket                                         | 4 Paket                                       | 66.000.000  | 4 Paket    | 68.000.000  | 4 Paket    | 70.000.000  | 4 Paket                                                            | 204.000.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                      | 2 Paket                                         | 2 Paket                                       | 12.000.000  | 2 Paket    | 13.000.000  | 2 Paket    | 15.000.000  | 2 Paket                                                            | 40.000.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       | 1 Paket                                         | 1 Paket                                       | 30.000.000  | 1 Paket    | 38.000.000  | 1 Paket    | 40.000.000  | 1 Paket                                                            | 108.000.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                | 1 Paket                                         | 1 Paket                                       | 25.000.000  | 1 Paket    | 30.000.000  | 1 Paket    | 35.000.000  | 1 Paket                                                            | 90.000.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             | 12 Dokumen                                      | 12 Dokumen                                    | 5.500.000   | 12 Dokumen | 5.500.000   | 12 Dokumen | 6.500.000   | 12 Dokumen                                                         | 17.500.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                              | 1 Paket                                         | 1 Paket                                       | -           | 1 Paket    | -           | 1 Paket    | -           | 1 Paket                                                            | -           | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                 | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                     | -           | 1 Laporan  | -           | 1 Laporan  | -           | 1 Laporan                                                          | -           | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | 5 Laporan                                       | 5 Laporan                                     | 150.000.000 | 5 Laporan  | 155.000.000 | 5 Laporan  | 185.000.000 | 5 Laporan                                                          | 490.000.000 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen  | -           | 1 Dokumen  | 5.000.000   | 1 Dokumen                                                          | 5.000.000   | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    | - Dokumen                                       | - Dokumen                                     | -           | - Dokumen  | -           | 1 Dokumen  | 5.000.000   | 1 Dokumen                                                          | 5.000.000   | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan               | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi        |                                                                    |                |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |         |                   |                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                 | 2024                                          |               | 2025       |               | 2026       |               |                                              |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |                |
|        |         |                   |                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                 | Target                                        | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            |                                              |               | Target                                                             | Rp             |
|        |         | X.XX.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 | Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                           | 100%                                            | 100%                                          | 255.000.000   | 100%       | 315.000.000   | 100%       | 350.000.000   | 100%                                         | 920.000.000   | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | - Unit                                          | -                                             | -             | -          | -             | 1 Unit     | 150.000.000   | 1 Unit                                       | 150.000.000   | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | - Unit                                          | -                                             | -             | -          | -             | 1 Unit     | 150.000.000   | 1 Unit                                       | 150.000.000   | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket                                         | 1 Paket                                       | -             | 1 Paket    | -             | 1 Paket    | -             | 1 Paket                                      | -             | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                          | -                                             | -             | 1 Unit     | -             | -          | -             | 1 Unit                                       | -             | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                      | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                          | 0 Unit                                          | -                                             | -             | 1 Unit     | -             | -          | -             | 1 Unit                                       | -             | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit                                          | 2 Unit                                        | 155.000.000   | 2 Unit     | 150.000.000   | 2 Unit     | 25.000.000    | 2 Unit                                       | 330.000.000   | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 10 Unit                                         | 10 Unit                                       | 100.000.000   | 10 Unit    | 165.000.000   | 10 Unit    | 25.000.000    | 10 Unit                                      | 290.000.000   | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                          | 100%                                            | 100%                                          | 2.533.263.090 | 100%       | 2.652.853.760 | 100%       | 2.817.853.760 | 100%                                         | 8.003.970.610 | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                                      | 12 Laporan                                    | -             | 12 Laporan | -             | 12 Laporan | 5.000.000     | 12 Laporan                                   | 5.000.000     | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                                      | 12 Laporan                                    | 325.000.000   | 12 Laporan | 390.000.000   | 12 Laporan | 450.000.000   | 12 Laporan                                   | 1.165.000.000 | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                                      | 12 Laporan                                    | 2.208.263.090 | 12 Laporan | 2.262.853.760 | 12 Laporan | 2.362.853.760 | 12 Laporan                                   | 6.833.970.610 | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah                         | 100%                                            | 100%                                          | 265.000.000   | 100%       | 295.000.000   | 100%       | 315.000.000   | 100%                                         | 875.000.000   | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                          | 5 Unit                                        | 65.000.000    | 5 Unit     | 70.000.000    | 5 Unit     | 75.000.000    | 5 Unit                                       | 210.000.000   | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |         | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 40 Unit                                         | 40 Unit                                       | 50.000.000    | 40 Unit    | 55.000.000    | 40 Unit    | 65.000.000    | 40 Unit                                      | 170.000.000   | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran                                                            | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                                                                 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |           |             |           |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi        |                                                                    |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                 | 2024                                          |             | 2025      |             | 2026      |               |                                              |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |                |
|        |                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                 | Target                                        | Rp          | Target    | Rp          | Target    | Rp            |                                              |               | Target                                                             | Rp             |
|        |                                                                    | X.XX.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                                                                                                | 4 Unit                                          | 4 Unit                                        | 150.000.000 | 4 Unit    | 170.000.000 | 4 Unit    | 175.000.000   | 4 Unit                                       | 495.000.000   | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                  | 3. Tingkat Inflasi                                                                                                                                                                       | 6,35%                                           | 3±1                                           | 767.483.310 | 3±1       | 880.692.640 | 3±1       | 1.169.037.710 | 3±1                                          | 2.817.213.660 | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        | Terkendalinya ketersediaan stok sembako dan barang penting lainnya |                   |                                                                                                                                                                                  | Persentase tingkat kecukupan stok sembako dan barang penting lainnya                                                                                                                     | 100%                                            | 100%                                          | 767.483.310 | 100%      | 880.692.640 | 100%      | 1.169.037.710 | 100%                                         | 2.817.213.660 | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |                                                                    | 03.30.02          | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                                                     | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUUP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)                                                    | 100%                                            | 100%                                          | 16.000.000  | 100%      | 38.654.930  | 100%      | 83.000.000    | 100%                                         | 137.654.930   | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |                                                                    | 3.30.02.2.01      | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan                                                                                       | Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan                                                                                    | 100%                                            | 100%                                          | -           | 100%      | -           | 100%      | -             | 100%                                         | -             | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |                                                                    | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen | -           | 1 Dokumen | -             | 1 Dokumen                                    | -             | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |                                                                    | 3.30.02.2.02      | Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                   | Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang Yang dimonitoring                                                                                                                                  | 8 Unit                                          | 75 Unit                                       | -           | 78 Unit   | -           | 80 Unit   | -             | 80 Unit                                      | -             | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |                                                                    | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen | -           | 1 Dokumen | -             | 1 Dokumen                                    | -             | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |                                                                    | 3.30.02.2.03      | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri                                                                            | Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu                                                                                                                                 | 100%                                            | 100%                                          | -           | 100%      | -           | 100%      | -             | 100%                                         | -             | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |
|        |                                                                    | 3.30.02.2.03.0001 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik                                                       | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik                                                           | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen | -           | 1 Dokumen | -             | 1 Dokumen                                    | -             | DKUMP                                                              | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                                                                                | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |            |            |            |            |                                                                    |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |         |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 2024                                          |            | 2025       |            | 2026       |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |             |                                              |                |
|        |         |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                 | Target                                        | Rp         | Target     | Rp         | Target     | Rp         | Target                                                             | Rp          |                                              |                |
|        |         | 3.30.02.2.03.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri                                           | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri                                                            | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -          | 1 Dokumen  | -          | 1 Dokumen  | -          | 1 Dokumen                                                          | -           | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.02.2.04      | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri                                            | Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu                                                                                                                                                 | 100%                                            | 100%                                          | -          | 100%       | -          | 100%       | -          | 100%                                                               | -           | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.02.2.04.0001 | Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri                 | Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri                                      | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -          | 1 Dokumen  | -          | 1 Dokumen  | -          | 1 Dokumen                                                          | -           | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.02.2.04.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri                                                      | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri                                                                       | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -          | 1 Dokumen  | -          | 1 Dokumen  | -          | 1 Dokumen                                                          | -           | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.02.2.05      | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat                          | Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C                                                                                                                                                     | 1 Kegiatan                                      | 1 Kegiatan                                    | 16.000.000 | 1 Kegiatan | 33.654.930 | 1 Kegiatan | 58.000.000 | 1 Kegiatan                                                         | 107.654.930 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.02.2.05.0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C                                                                   | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 16.000.000 | 1 Dokumen  | 33.654.930 | 1 Dokumen  | 58.000.000 | 1 Dokumen                                                          | 107.654.930 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.02.2.06      | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota                                                | 1 Kegiatan                                      | 1 Kegiatan                                    | -          | 1 Kegiatan | 5.000.000  | 1 Kegiatan | 25.000.000 | 1 Kegiatan                                                         | 30.000.000  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.02.2.06.0001 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya                                                                                                                                            | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                     | -          | 1 Laporan  | -          | 1 Laporan  | -          | 1 Laporan                                                          | -           | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                                                       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |             |            |             |                                                                    |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |         |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                 | 2024                                          |             | 2025       |             | 2026       |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |               |                                              |                |
|        |         |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                 | Target                                        | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target                                                             | Rp            |                                              |                |
|        |         | 3.30.02.2.06.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2                                                           | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen  | -           | 1 Dokumen  | -           | 1 Dokumen                                                          | -             | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                     | -           | 1 Laporan  | 5.000.000   | 1 Laporan  | 25.000.000  | 1 Laporan                                                          | 30.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.02.2.07      | Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)       | Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu                                                                                                                                    | 100%                                            | 100%                                          | -           | 100%       | -           | 100%       | -           | 100%                                                               | -             | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.02.2.07.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                        | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                                                                                                | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen  | -           | 1 Dokumen  | -           | 1 Dokumen                                                          | -             | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 03.30.04          | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                       | 1. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu                                                                                                                              | 2%                                              | 2%                                            | 349.445.600 | 3%         | 405.000.000 | 3%         | 459.000.000 | 3%                                                                 | 1.213.445.600 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         |                   |                                                                                                                                           | 2. Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                                                          | 50%                                             | 60%                                           |             | 60%        |             | 70%        |             | 70%                                                                |               | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.01      | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                         | Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.                                                                                                         | 12 Laporan                                      | 12 Laporan                                    | 7.000.000   | 12 Laporan | 45.000.000  | 12 Laporan | 79.000.000  | 12 Laporan                                                         | 131.000.000   | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                       | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                             | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                     | -           | 1 Laporan  | 15.000.000  | 1 Laporan  | 25.000.000  | 1 Laporan                                                          | 40.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                     | -           | 1 Laporan  | 15.000.000  | 1 Laporan  | 25.000.000  | 1 Laporan                                                          | 40.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                      | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                                  | 2 Laporan                                       | 2 Laporan                                     | 7.000.000   | 2 Laporan  | 15.000.000  | 2 Laporan  | 29.000.000  | 2 Laporan                                                          | 51.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                                  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |             |            |             |                                                                    |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |         |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                 | 2024                                          |             | 2025       |             | 2026       |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |               |                                              |                |
|        |         |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                 | Target                                        | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target                                                             | Rp            |                                              |                |
|        |         | 3.30.04.2.02      | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                              | Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar                                        | 12 Laporan                                      | 12 Laporan                                    | 342.445.600 | 12 Laporan | 360.000.000 | 12 Laporan | 380.000.000 | 12 Laporan                                                         | 1.082.445.600 | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota               | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota      | 12 Laporan                                      | 12 Laporan                                    | -           | 12 Laporan | -           | 12 Laporan | 15.000.000  | 12 Laporan                                                         | 15.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan          | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 12 Laporan                                      | 12 Laporan                                    | 42.445.600  | 12 Laporan | 60.000.000  | 12 Laporan | 65.000.000  | 12 Laporan                                                         | 167.445.600   | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | 2 Laporan                                       | 2 Laporan                                     | 300.000.000 | 2 Laporan  | 300.000.000 | 2 Laporan  | 300.000.000 | 2 Laporan                                                          | 900.000.000   | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.03      | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi                                                                                                          | 2 Kegiatan                                      | 2 Kegiatan                                    | -           | 2 Kegiatan | -           | 2 Kegiatan | -           | 2 Kegiatan                                                         | -             | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.03.0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                                 | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                                    | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | -           | 1 Dokumen  | -           | 1 Dokumen  | -           | 1 Dokumen                                                          | -             | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.03.0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                                 | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                     | -           | 1 Laporan  | -           | 1 Laporan  | -           | 1 Laporan                                                          | -             | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                 | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                           | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                     | -           | 1 Laporan  | -           | 1 Laporan  | -           | 1 Laporan                                                          | -             | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 03.30.05          | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                         | Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina                                                                                                                | 50%                                             | 60%                                           | -           | 60%        | -           | 70%        | 130.000.000 | 70%                                                                | 130.000.000   | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.05.2.01      | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang                                                                                                | 1 Kegiatan                                      | 1 Kegiatan                                    | -           | 1 Kegiatan | -           | 1 Kegiatan | 130.000.000 | 1 Kegiatan                                                         | 130.000.000   | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode                | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                      |                    |                       |                    |                                                                    |                    | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |         |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                 | 2024                                          |                    | 2025                 |                    | 2026                  |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |                    |                                              |                |
|        |         |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                 | Target                                        | Rp                 | Target               | Rp                 | Target                | Rp                 | Target                                                             | Rp                 |                                              |                |
|        |         | 3.30.05.2.01.0002   | Pameran Dagang Nasional                                                                            | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                     | 5 Pelaku Usaha                                  | 5 Pelaku Usaha                                | -                  | 5 Pelaku Usaha       | -                  | 5 Pelaku Usaha        | -                  | 5 Pelaku Usaha                                                     | -                  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.05.2.01.0003   | Pameran Dagang Lokal                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal                                                               | 5 Pelaku Usaha                                  | 5 Pelaku Usaha                                | -                  | 5 Pelaku Usaha       | -                  | 5 Pelaku Usaha        | -                  | 5 Pelaku Usaha                                                     | -                  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.05.2.01.0004   | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                            | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                 | 5 Pelaku Usaha                                  | 5 Pelaku Usaha                                | -                  | 5 Pelaku Usaha       | -                  | 5 Pelaku Usaha        | 100.000.000        | 5 Pelaku Usaha                                                     | 100.000.000        | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.05.2.01.0005   | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                    | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi                                                       | 2 Produk                                        | 2 Produk                                      | -                  | 2 Produk             | -                  | 2 Produk              | 30.000.000         | 2 Produk                                                           | 30.000.000         | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | <b>03.30.06</b>     | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                             | <b>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTPP ) bertanda tera sah yang berlaku</b>                   | <b>100%</b>                                     | <b>100%</b>                                   | <b>102.037.710</b> | <b>100%</b>          | <b>137.037.710</b> | <b>100%</b>           | <b>147.037.710</b> | <b>100%</b>                                                        | <b>386.113.130</b> | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | <b>3.30.06.2.01</b> | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>                        | <b>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</b>                                          | <b>17802 Unit</b>                               | <b>17900 Unit</b>                             | <b>102.037.710</b> | <b>18000 Unit</b>    | <b>137.037.710</b> | <b>18000 Unit</b>     | <b>147.037.710</b> | <b>18000 Unit</b>                                                  | <b>386.113.130</b> | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.06.2.01.0001   | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                               | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                 | 17802 Unit                                      | 17900 Unit                                    | 102.037.710        | 18000 Unit           | 137.037.710        | 18000 Unit            | 147.037.710        | 18000 Unit                                                         | 386.113.130        | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.06.2.01.0002   | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                              | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                      | 50 Orang                                        | 70 Orang                                      | -                  | 80 Orang             | -                  | 100 Orang             | -                  | 100 Orang                                                          | -                  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.06.2.01.0003   | Penyidikan Metrologi Legal                                                                         | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal                                                                                   | 1 Unit                                          | 1 Unit                                        | -                  | 1 Unit               | -                  | 1 Unit                | -                  | 1 Unit                                                             | -                  | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | <b>03.30.07</b>     | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                                        | <b>Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>                          | <b>0,27%</b>                                    | <b>0,27%</b>                                  | <b>300.000.000</b> | <b>0,40%</b>         | <b>300.000.000</b> | <b>0,53%</b>          | <b>375.000.000</b> | <b>0,53%</b>                                                       | <b>950.000.000</b> | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | <b>3.30.07.2.01</b> | <b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>               | <b>Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>                              | <b>50 Unit Usaha</b>                            | <b>50 Unit Usaha</b>                          | <b>300.000.000</b> | <b>75 Unit Usaha</b> | <b>300.000.000</b> | <b>100 Unit Usaha</b> | <b>375.000.000</b> | <b>100 Unit Usaha</b>                                              | <b>950.000.000</b> | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.07.2.01.0004   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 15 Orang                                        | 25 Orang                                      | -                  | 30 Orang             | -                  | 35 Orang              | 25.000.000         | 35 Orang                                                           | 25.000.000         | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         | 3.30.07.2.01.0005   | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                       | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                        | 15 UMKM                                         | 25 UMKM                                       | -                  | 30 UMKM              | -                  | 35 UMKM               | 50.000.000         | 35 UMKM                                                            | 50.000.000         | DKUMP                                        | Kota Pontianak |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan                                                         | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |         |                |          |                |                                                                    |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
|        |         |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                 | 2024                                          |                | 2025    |                | 2026     |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026) |                |                                              |                |
|        |         |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                 | Target                                        | Rp             | Target  | Rp             | Target   | Rp             | Target                                                             | Rp             |                                              |                |
|        |         | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 50 UMKM                                         | 50 UMKM                                       | 300.000.000    | 75 UMKM | 300.000.000    | 100 UMKM | 300.000.000    | 100 UMKM                                                           | 900.000.000    | DKUMP                                        | Kota Pontianak |
|        |         |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                 |                                               | Pagu 2024      |         | Pagu 2025      |          | Pagu 2026      |                                                                    | Akhir          |                                              |                |
|        |         |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                 |                                               | 16.627.329.000 |         | 17.478.761.000 |          | 18.381.193.000 |                                                                    | 52.445.783.000 |                                              |                |

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mendukung tujuan pada RPD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 pada : **Tujuan IV : “TERCIPTANYA PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN”**.

Tujuan 4 : Terciptanya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing Disertai Penghidupan Yang Layak Dan Pemerataan Kesejahteraan.

Indikator : Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Sasaran Tujuan ke 4:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Tujuan ke 4:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Inflasi

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 Adalah sebagai berikut :

| No         | Indikator                                                            | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun |        |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------------------------|
|            |                                                                      | Tahun 2022                            | 2024                        | 2025   | 2026  |                                        |
| 1          | 2                                                                    | 3                                     | 4                           | 5      | 6     | 7                                      |
| <b>I</b>   | <b>Laju PDRB Sektor Perdagangan</b>                                  | 4,97%                                 | 4,98%                       | 4,99%  | 5,00% | 5,00%                                  |
| <b>II</b>  | <b>Laju PDRB Sektor Industri</b>                                     | 4,74%                                 | 4,75%                       | 4,77%  | 4,80% | 4,80%                                  |
|            | Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan    | 60%                                   | 75%                         | 80%    | 85%   | 85%                                    |
|            | Persentase Koperasi Aktif                                            | 95%                                   | 97%                         | 97,50% | 98%   | 98%                                    |
|            | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru                              | 4,30%                                 | 5%                          | 5,50%  | 6%    | 6%                                     |
|            | Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil                  | 2,36%                                 | 2,50%                       | 2,60%  | 2,80% | 2,80%                                  |
| <b>III</b> | <b>Tingkat Inflasi</b>                                               | 6,35%                                 | 3±1                         | 3±1    | 3±1   | 3±1                                    |
|            | Persentase Tingkat Kecukupan Stok Sembako dan Barang Penting Lainnya | 100%                                  | 100%                        | 100%   | 100%  | 100%                                   |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Tujuan RPD Kota Pontianak ke 4 tahun 2024 – 2026 yaitu **”Terciptanya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing Disertai Penghidupan Yang Layak Dan Pemerataan Kesejahteraan”**.

WALI KOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

# **RENSTRA TAHUN 2024 - 2026**

## **DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

*Jalan Alianyang No. 7 C Pontianak*

*Telp/Fax : (0561) 730416*

*Email : [dkump@pontianak.go.id](mailto:dkump@pontianak.go.id)*

*Website : [diskumdag.pontianak.go.id](http://diskumdag.pontianak.go.id)*